



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 49 TAHUN 2021**

**TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Dinas Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Dinas Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Dinas tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Dinas Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Dinas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Dinas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Dinas Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

NURDINYANA

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 49**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan

mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Garut masih dihadapkan pada tantangan penanganan virus COVID-19. Seperti diketahui bersama bahwa penyebaran pandemi COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia yang sampai saat ini masih terdapat indikasi penyebaran pandemi COVID-19 yang belum menurun, bahkan ada di beberapa negara timbul varian baru. Sehingga diprediksi tahun 2022 pandemi COVID-19 ini masih ada di Indonesia dan diperkirakan akan terkendali pada tahun 2022, apabila vaksin tersebut sudah terdistribusi kepada sebagian besar masyarakat Indonesia serta dapat memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai terlepas dari tekanan pandemi COVID-19 dan merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2022 ini, upaya penanganan pandemi COVID-19 dilakukan secara komprehensif melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemi COVID-19, serta pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan penetapan.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut disusun dengan berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 12);
17. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

18. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
19. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
20. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Perberasan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 54);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 42).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

- 1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis;
- 2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Pemerintah Kabupaten Garut.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional
- 3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan Provinsi
- 3.3. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut
- 3.4. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.5. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- 5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja
- 5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2020, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan,; 2) mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi fahtor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut pada tahun 2020 telah melaksanakan 1 (satu) program utama/teknis yang tercantum dalam penetapan kinerja dan 3 (tiga) program generik yang sifatnya *supporting* terhadap program utama/teknis. Total anggaran Dinas Ketahanan Pangan tahun 2020 sebesar Rp. 8.471.730.274,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.590.468.519,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.881.261.755,00. Dari total anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 8.368.098.479,00 atau 98,78% dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.488.050.440,00 atau

97,77% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.880.048.479,00 atau 99,97%. Terhadap masing-masing program tersebut dianalisis sebagai berikut :

Tabel 2.1

Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2020

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA	8.471.730.274	8.368.098.917	98,78
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.590.468.519	4.488.050.440	97,77
5.2	BELANJA LANGSUNG	3.881.261.755	3.880.048.477	99,97
2.03.2.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	436.100.458	435.368.182	99,83
2.03.2.03.01.002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	50.184.000	49.487.724	98,61
2.03.2.03.01.006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3.185.900	3.149.900	98,87
2.03.2.03.01.008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	78.344.800	78.344.800	100,00
2.03.2.03.01.009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1.050.000	1.050.000	100,00
2.03.2.03.01.010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	84.274.050	84.274.050	100,00
2.03.2.03.01.011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.215.250	11.215.250	100,00
2.03.2.03.01.012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.078.000	2.078.000	100,00
2.03.2.03.01.013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.935.265	101.935.265	100,00
2.03.2.03.01.014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.269.500	3.269.500	100,00
2.03.2.03.01.015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.496.000	2.496.000	100,00
2.03.2.03.01.017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	3.540.000	3.540.000	100,00
2.03.2.03.01.033	Penyediaan Jasa Keamanan	76.285.600	76.285.600	100,00
2.03.2.03.01.079	Kegiatan Penyediaan Jasa Publikasi	300.000	300.000	100,00
2.03.2.03.01.092	Kegiatan Rapat-Rapat Konsultasi ke Luar Daerah	12.592.093	12.592.093	100,00
2.03.2.03.01.094	Kegiatan Rapat-Rapat Pembinaan ke Dalam Daerah	5.350.000	5.350.000	100,00
2.03.2.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.280.398.792	2.280.398.790	100,00

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
2.03.01.02.005	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.980.025.000	1.980.025.000	100,00
2.03.01.02.010	Kegiatan Pengadaan Meubeulair	124.607.500	124.607.500	100,00
2.03.01.02.022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berala Gedung Kantor	-	-	-
2.03.01.02.024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9.386.292	9.386.290	100,00
2.03.01.02.042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	166.380.000	166.380.000	100,00
2.03.2.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-
2.03.01.05.010	Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pegawai	-	-	-
2.03.2.03.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-
2.03.2.03.06.001	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-
2.03.2.03.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	350.000	350.000	100,00
2.03.2.03.07.014	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	350.000	350.000	100,00
2.03.2.03.01.16	Program Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan	146.270.000	146.270.000	100,00
2.03.2.03.01.16.001	Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan	14.925.000	14.925.000	100,00
2.03.2.03.01.16.003	Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	28.675.000	28.675.000	100,00
2.03.2.03.01.16.040	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Pangan	86.405.000	86.405.000	100,00
2.03.2.03.01.16.041	Kegiatan Bank Pangan	16.265.000	16.265.000	100,00
2.03.01.17	Program Penguatan Distribusi dan Peningkatan Akses Pangan	715.538.750	715.092.750	99,94
2.03.01.17.001	Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	630.241.250	629.795.250	99,93
2.03.01.17.002	Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Strategis	9.855.000	9.855.000	100,00
2.03.01.17.004	Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat	75.442.500	75.442.500	100,00
2.03.01.18	Program Peningkatan Kualitas dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	153.177.655	153.142.655	99,98
2.03.2.03.01.18.015	Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan pengolahan Hasil Pertanian	8.875.000	8.875.000	100,00

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
2.03.2.03.01.18.016	Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	118.552.655	118.517.655	99,97
2.03.2.03.01.18.046	Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	25.750.000	25.750.000	100,00
2.03.01.19	Program Peningkatan Keamanan Pangan	149.426.100	149.426.100	100,00
2.03.01.19.001	Kegiatan Peningkatan Mutu Keamanan Pangan	28.790.000	28.790.000	100,00
2.03.01.19.002	Kegiatan Pemantauan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan	108.556.000	108.556.000	100,00
2.03.01.19.002	Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan informasi Keamanan Pangan	12.080.100	12.080.100	100,00

I. Program Generik

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 436.100.458,00 dengan realisasi sebesar Rp. 435.368.182,00 atau 99,83% dengan realisasi fisik 100%, yang diimplementasikan ke dalam kegiatan :

- (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp. 50.184.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.487.724,00 atau sebesar 98,61% dengan realisasi fisik 100%. Sasaran kegiatan ini yaitu terpenuhinya pelayanan kebutuhan kantor berupa telepon, air dan listrik. Keluaran kegiatan ini adalah terpenuhinya pembayaran tagihan telepon, air dan listrik selama 12 bulan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah lancarnya pemakaian telepon, air dan listrik;
- (2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran Rp. 3.185.900,00 terealisasi sebesar Rp. 3.149.900,00 atau sebesar 98,94% dengan realisasi fisik 100%. Sasaran kegiatan ini yaitu terpenuhinya pelayanan kebutuhan kantor berupa perijinan kendaraan. Keluaran kegiatan ini adalah

jumlah mobil dan motor yang dibayarkan STNK sebanyak 26 unit. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah taatnya perijinan kendaraan dinas/operasional;

- (3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 78.344.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 78.344.800,- atau sebesar 100%. Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Output kegiatan ini yaitu tersedianya jasa kebersihan kantor. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya pembayaran petugas kebersihan 24 OB, terfasilitasinya pembayaran petugas jaga malam 24 OB dan tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 17 jenis;
- (4) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, dengan anggaran sebesar Rp. 1.050.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.050.000,-. Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Output kegiatan ini yaitu tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terfasilitasinya service komputer 8 unit, laptop 10 unit dan printer 15 unit;
- (5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 84.274.050,- dengan realisasi sebesar Rp. 84.274.050,-,- Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Output kegiatan ini yaitu tersedianya alat tulis kantor. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya alat-alat tulis kantor 30 jenis, materai 3000 50 buah, materai 6000 120 buah dan buku cek 10 buku;
- (6) Kegiatan Penyediaan Barang-barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp.11.215.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.215.250,- Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Output kegiatan ini yaitu tersedianya

barang-barang cetakan dan penggandaan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersedianya spanduk 17 meter, stop map dinas 200 buah, buku disposisi surat masuk 25 buku, buku disposisi surat keluar 25 buku, kartu disposisi 25 buku, kwitansi karbonis 25 buku dan terfasilitasinya belanja photocopy 120.000 lembar;

- (7) Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.2.078.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.078.000,-. Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Output kegiatan ini yaitu tersedianya komponen instalasi penerangan bangunan kantor. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya Neon TL (20 watt) 16 buah, tersedianya Neon TL (40 watt) 16 buah, Kabel NYM 3x1,5 2 roll, Terminal Lubang 10 meter, Isolasi listrik 3 buah dan Klem Kabel 2 buah;
- (8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran sebesar Rp.3.269.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.269.500,-. Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan . Output kegiatan ini yaitu tersedianya peralatan rumah tangga. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersedianya Piring 1 lusin, piring kue 1 lusin, sendok 1 lusin, mangkok 1 lusin, gelas jus 2 lusin, tea set 2 set, taplak 6 buah, nampan 2 buah, kopi set 1 set, dan teko listrik 1 buah;
- (9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran sebesar Rp.2.496.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.496.000,-. Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Output kegiatan ini yaitu tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya

surat kabar harian nasional 24 exemplar, tersedianya surat kabar harian regional 24 exemplar, tersedianya surat kabar mingguan lokal 24 exemplar, dan tersedianya surat kabar mingguan nasional 24 exemplar;

- (10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan anggaran sebesar Rp.3.540.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.540.000,-. Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan . Output kegiatan ini yaitu tersedianya makanan dan minuman Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya jamuan makan biasa untuk rapat 96 box;
- (11) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan, dengan anggaran sebesar Rp.76.285.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 76.285.600,-. Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Output kegiatan ini yaitu tersedianya jasa keamanan gedung dan sarana prasarana kantor untuk 1 tahun;
- (12) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.12.592.093,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.592.093,-. Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Output kegiatan ini yaitu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi untuk 12 orang;
- (13) Kegiatan Penyediaan Jasa Publikasi, dengan anggaran sebesar Rp. 300.000,- dengan realisasi sebesar Rp.300.000,-. Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Output kegiatan ini yaitu tersedianya jasa publikasi Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya iklan kolom 1 kali;
- (14) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.5.350.000,- dengan realisasi sebesar Rp.

5.350.000,-. Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Output kegiatan ini yaitu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi untuk 8 orang;

2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 2.280.398.792,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.280.398.792,- atau 100% dengan realisasi fisik 100%, yang diimplementasikan ke dalam kegiatan, yaitu :

- (1) Kegiatan Pengadaan Meubeulair, dengan anggaran sebesar Rp. 124.607.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 124.607.500,- dengan realisasi fisik 100%. Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan . Output kegiatan ini yaitu terlaksananya pengadaan meubeulair. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya penataan meja kerja ruangan bidang seluas 42,6 meter persegi;
- (2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 0,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Output kegiatan ini yaitu terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan gedung 0 unit;
- (3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan anggaran sebesar Rp.9.386.292,- dengan realisasi sebesar Rp.9.386.292,- . Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Output kegiatan ini yaitu terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Hasil yang dicapai dari kegiatan ini

adalah terfasilitasinya service mobil 4 unit, service motor 2 unit, terfasilitasinya suku cadang mobil 4 unit, terfasilitasinya pelumas mobil 4 unit dan terfasilitasinya pelumas motor 1 unit;

- (4) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.166.380.000,- dengan realisasi sebesar Rp.166.380.000,- Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan . Output kegiatan ini yaitu terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan pos satpam 1 unit dan pembangunan garasi/penataan tempat parkir 1 unit;

3) Peningkatan Perencanaan SKPD

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 350.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 350.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100%, yang diimplementasikan ke dalam kegiatan, yaitu :

- (1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, dengan anggaran sebesar Rp.350.000,- dengan realisasi sebesar Rp.350.000,-. Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Output kegiatan ini yaitu terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan 1 dokumen;

II. Program Teknis

1) Peningkatan Ketahanan Pangan

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 1.164.412.505,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.163.931.505,- atau 99,96% dengan realisasi fisik 100%, yang diimplementasikan ke dalam kegiatan , yaitu :

- (1) Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan, dengan anggaran sebesar Rp. 14.925.000,- dengan

realisasi sebesar Rp. 14.925.000,-. Lokasi kegiatan Kec. Singajaya Desa Pancasura dan Kec. Karangpawitan Desa Godog. Output kegiatan ini yaitu terfasilitasinya pengembangan desa mandiri pangan Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan organisasi dan usaha mikro desa mandiri pangan sebanyak 50 orang;

- (2) Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp. 28.675.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.675.000,-. Lokasi kegiatan Kec. Pameungpeuk Desa Bojong Kidul, Kec. Sukaresmi Desa Padamukti, Kec. Pameungpeuk Desa Jatimulya dan Kec. Cisompet Desa Sukanagara. Output kegiatan ini yaitu terfasilitasinya pengembangan lumbung pangan masyarakat. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terselenggaranya sosialisasi lumbung pangan sebanyak 10 orang dan terselenggaranya pengadaan bantuan gabah 8000 kg.
- (3) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Pangan, dengan anggaran sebesar Rp.86.405.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 86.405.000,-. Lokasi kegiatan Kec. Cisurupan Desa Cisurupan dan Kec. Cisompet Desa Jatisari. Output kegiatan ini yaitu terfasilitasinya pengembangan sumber daya pangan Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya jumlah buku inventaris Sumber Daya Pangan 5 buku, terlaksananya sosialisasi kegiatan pengembangan sumber daya pangan sebanyak 40 orang, Terciptanya pengembangan kawasan sentra pangan talas dan ganyol 2 lokasi, Terselenggaranya bantuan bibit talas 10000 batang, Terselenggaranya bantuan bibit ganyol 600 kg, Terselenggaranya bantuan pupuk organik 10000 kg dan

Terselenggaranya bantuan pupuk npk 600 kg;

- (4) Kegiatan Bank Pangan, dengan anggaran sebesar Rp.16.265.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.265.000,-. Lokasi kegiatan Kec. Banjarwangi Desa Kadongdong. Output kegiatan ini yaitu terfasilitasinya Bank Pangan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi dan pembinaan tata kelola bank pangan untuk 30 orang;
- (5) Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.630.241.250,- dengan realisasi sebesar Rp.629.795.250,-. Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Output kegiatan ini yaitu tersedianya cadangan pangan daerah Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya jumlah pengadaan beras untuk cadangan pangan pemerintah daerah 50.0000 kg dan terselenggaranya pengadaan plastic kemasan 11.150 lembar;
- (6) Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Strategis, dengan anggaran sebesar Rp.9.855.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.855.000,-. Lokasi kegiatan Kabupaten Garut. Output kegiatan ini yaitu terlaksananya pemantauan dan analisis harga pangan pokok strategis. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya data laporan harga pangan pokok strategis dari 10 kecamatan;
- (7) Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp.75.442.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 75.442.500,-. Lokasi kegiatan Kabupaten Garut. Output kegiatan ini yaitu terselenggaranya FGD Asosiasi LDPM dan LUPM 25 orang, terselenggaranya pengadaan tenda 5 buah, terselenggaranya pengadaan meja 6 unit,

terselenggaranya pengadaan kursi 10 unit, terselenggaranya pengadaan mesin hitung 1 unit, terselenggaranya pengadaan rak pajangan 5 unit, terselenggaranya pengadaan wrafining 1 buah, terselenggaranya pengadaan timbangan digital 1 unit, terselenggaranya pengadaan timbangan duduk 2 buah, terselenggaranya pengadaan kontainer plastic 10 unit, terselenggaranya pengadaan mesin stiker label 1 buah dan Terselenggaranya pengadaan troli 1 unit;

- (8) Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian, dengan anggaran sebesar Rp.8.875.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.875.000,- Lokasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan . Output kegiatan ini yaitu terfasilitasinya penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya bimtek pengoperasian alat pengolah pangan sebanyak 40 orang, terseleggaranya pengadaan bantuan mesin penepung sebanyak 3 unit dan terseleggaranya pengadaan bantuan mesin pengiris umbi sebanyak 3 unit;
- (9) Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan, dengan anggaran sebesar Rp.118.552.655,- dengan realisasi sebesar Rp.118.517.655,- Lokasi kegiatan Kec. Tarogong Kaler Desa Mekarwangi dan Kec. Malangbong Desa Sukajaya. Output kegiatan ini yaitu meningkatnya pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pengadaan bantuan bantuan sarana obor pangan lestari (OPAL) 1 paket;
- (10) Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, dengan anggaran sebesar Rp.25.750.000,-

dengan realisasi sebesar Rp. 25.750.000,-. Lokasi kegiatan Kabupaten Garut . Output kegiatan ini yaitu terfasilitasinya promosi penganeekaragaman konsumsi pangan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terselenggaranya bimtek B2SA untuk 100 orang, rerseleggaranya sosialisasi konsumsi pangan B2SA 100 orang dan terseleggaranya sosialisasi konsumsi pangan B2SA 100 orang;

- (11) Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan, dengan anggaran sebesar Rp.28.790.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.790.000,-. Lokasi kegiatan Kabupaten Garut. Output kegiatan ini yaitu terfasilitasinya peningkatan mutu dan keamanan pangan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terselenggaranya bimtek kelembagaan petani produk prima 175 orang dan terlaksananya pengujian pangan segar untuk sertifikasi prima 7 produk;
- (12) Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, dengan anggaran sebesar Rp.108.556.000,- dengan realisasi sebesar Rp.108.556.000,-. Lokasi kegiatan Kabupaten Garut. Output kegiatan ini yaitu terlaksananya pemantauan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya rapid test kit 18 unit, Terselenggaranya pengadaan bahan perlengkapan pengujian 3 unit;
- (13) Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan, dengan anggaran sebesar Rp.12.080.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.080.100,-. Lokasi kegiatan Kabupaten Garut. Output kegiatan ini yaitu meningkatnya kerjasama dan informasi keamanan pangan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terselenggaranya sosialisasi keamanan pangan segar asal tumbuhan 100 orang,

terselenggaranya pengadaan leaflet 1000 lembar dan terselenggaranya pengadaan banner 1 buah;

Hasil Analisis pencapaian kinerja 1 (satu) program utama/teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut pada tahun 2020 di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan sebagian besar terpenuhi, sedangkan dengan melihat proporsi realisasi anggaran, maka rata-rata penyerapan anggaran untuk program yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) adalah sebesar 99,47%.

Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran, dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2020 yang diperoleh hasil capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut sebesar 100,91%. Dengan capaian kinerja tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya.

Sedangkan untuk tahun 2021, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut melaksanakan 1 (satu) program penunjang dengan 6 (enam) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan dan 4 (empat) program teknis dengan 6 (enam) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rincian Anggaran Dinas Ketahanan Pangan
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Belanja Tidak Langsung	4.950.826.721	APBD Kab.
2	Belanja Langsung	12.740.000.001	APBD Kab.
Jumlah		17.690.826.722	

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, memperoleh dukungan

anggaran sebesar Rp. 18.275.500,00, yang diimplementasikan melalui sub kegiatan, yaitu :

(1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp. 18.275.500,00

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diimplementasikan melalui sub kegiatan, yaitu :

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran 4.950.826.721,00

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang diimplementasikan melalui sub kegiatan,yaitu :

(1) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran Rp. 112.215.932,00

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diimplementasikan melalui sub kegiatan, yaitu :

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp. 2.923.600,00

(2) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp. 158.911.959,00

(3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran Rp. 7.570.200,00

(4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran Rp. 31.460.000,00

(5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 43.017.000,00

(6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran Rp. 10.728.000,00

(7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp. 171.124.000,00

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan

dengan sub kegiatan, yaitu :

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp. 63.498.200,00;

(2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp. 7.300.000,00;

(3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp. 75.534.600,00;

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan dengan sub kegiatan yaitu :

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp. 96.621.700,00;

(2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp. 3.500.000,00;

(3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp. 82.732.910,00

(4) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 1.194.920.900,- melalui

1) Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang diimplementasikan melalui sub kegiatan, yaitu :

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan dengan anggaran Rp. 997.900.000,-

(2) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya dengan anggaran Rp. 197.020.900,-

(5) **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat** memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 9.629.457.500,- melalui :

1) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang diimplementasikan melalui sub kegiatan, yaitu :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan anggaran Rp. 215.960.000,-
- 2) Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan dengan anggaran Rp. 53.810.000,-
- 3) Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan dengan anggaran Rp. 189.200.000,-

2) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota yang diimplementasikan melalui sub kegiatan, yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 6.854.841.000,-

3) Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi yang diimplementasikan melalui sub kegiatan, yaitu :

- 1) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan anggaran Rp. 2.315.646.500,-

(6) **Program Penanganan Kerawanan Pangan** memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 412.180.000,-

1) Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota yang diimplementasikan melalui sub kegiatan, yaitu :

(1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 412.180.000,-

(7) **Program Pengawasan Keamanan Pangan** memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 621.528.000,-

1) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang diimplementasikan melalui sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 92.551.000,-

2. Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 165.431.500,-

3. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 363.545.500,-

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi. Untuk itu diperlukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut, sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas dan fungsi sangat perlu guna penyeimbangan dalam

pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Resntra SKPD;

Implikasi yang timbul dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.

- c. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Garut

Nama OPD : Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021 (tahun -1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar												
2	9	Bidang Urusan Pangan											
2	9	1	Dinas Ketahanan Pangan										
2	9	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor (%)	100	100	100	100	100	100			
2	9	1	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun (dokumen)	29			28				
2	9	1	2.01	1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (dokumen)	7	2	1	1	100	1	50
2	9	1	2.01	6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun (laporan)	35	-	-	-	-	21	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan 2021 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021 (tahun -1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2 09 01 2.05 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian ASN yang diadakan (orang)	270	70	-	-	-	-	-	
2 09 01 2.05 09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sumber daya pegawai yang ditingkatkan kualitasnya (Orang)	270	-	-	-	-	-	-	
2 09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Kantor	7				7			
2 09 01 2.06 1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik yang dibeli (jenis)	36	12	6	6	100	5	100	
2 09 01 2.06 2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli (jenis)	43	15	7	5	70	12	100	
2 09 01 2.06 3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli (jenis)	60	21	11	11	100	1	100	
2 09 01 2.06 4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makan dan minum(box)	1.716	877	96	96	100	1444	65	
2 09 01 2.06 5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan (jenis)	50	9	2	2	100	2	23	
2 09 01 2.06 6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah majalah dan surat kabar yang berlangganan (eksemplar)	480	120	24	24	100	96	24	
2 09 01 2.06 9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi (tahun)	6	2	1	1	100	1	50	
2 09 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang milik daerah yang diadakan (jenis)	-				5			
2 09 01 2.07 0	Sub Kegiatan Pengadaan	Jumlah kendaraan	6	-	-	-	-	-	-	

			09	1	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dinas perorangan/jabatan yang terpelihara dan terbayarkan pajak (unit)							
--	--	--	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan 2021 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021 (tahun -1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
2	09	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara dan terbayarkan pajak (unit)	135	27	27	27	100	30	5	18
2	09	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang terpelihara (unit)	6	2	1	1	100	1	1	100
2	09	01	2.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara (unit)	6	1	-	-	-	-	-	-
2	09	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan energi perkapita (kcal/kap/hari)	5.920					5.909		
2	09	02	2.01		Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan (unit)	10					-		
2	09	02	2.01	01	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang dibangun (unit)	15	1	3	0	0	1		
2	09	02	2.01	02	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah lantai jemur yang dibangun (unit)	15	1	-	-	-	1		
2	09	02	2.01	03	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah kelembagaan Bank Pangan yang dibentuk (unit)	15	1	1	1	100	1		
2	09	02	2.01	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	15		-	-	-	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan 2021 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021 (tahun -1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.02.01.05	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah laporan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Kemandirian Pangan (buah)	-		-	-	-	-	-	
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Stabilitas harga dan pasokan pangan (CV beras) (%)	< 9				<10			
2.09.03.01	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Efisiensi distribusi pangan (%)	< 33				<33			
2.09.03.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan Informasi harga pangan dan NBM yang disusun (laporan)	6		-	-	-	-	-	
2.09.03.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah lokasi pengembangan sentra pangan lokal (lokasi)	5	2	2	2	100	4		
2.09.03.01.04	Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah lokasi dan komoditi yang dipantau (lokasi dan komoditi)	45 50	18	10	10	100	1	50	
2.09.03.01.05	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelembagaan distribusi pangan yang dibina (unit)	10		-	-	-	3	-	
2.09.03.01.06	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah kelembagaan usaha pangan yang dibina (unit)	50		-	-	-	1	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan 2021 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021 (tahun -1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
2	09	03	2.02	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) (Ton)	500				50			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan yang dilaksanakan (kali)	-				1		-	
2	09	03	2.02	03 Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) yang diadakan	500		50	50	100	500	500	100
2	09	03	2.04	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Ratio konsumsi protein nabati terhadap total konsumsi ideal (%)	0,124					0,123		
2	09	03	2.04	02 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan (kelompok)	5	2	2	2	100	3	-	
2	09	04		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan (%)	7,24					6,26		
2	09	04	2.01	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah laporan Analisa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (laporan)	-					-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan 2021 n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021 (tahun -1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2 09 04 2.01 1	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Hasil analisa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (laporan)	5		-	-	-	-		
2 09 04 2.02	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa/lokasi rawan/rentan pangan yang diintervensi	5					-		
2 09 04 2.02 1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Pangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan (kali)	5		-	-	-	-		
2 09 04 2.02 2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa/lokasi rawan/rentan pangan yang diintervensi (lokasi)	5	5	5	5	100	4	-	-
2 09 05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan (%)	> 80					77,45		
2 09 05 2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk pangan segar asal tumbuhan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan (Sertifikasi dan Registrasi) (buah)	90					70		
2 09 05 2.01 1	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan yang dibina (Orang)	750	7	7	7	100	-	-	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan desentralisasi sesuai bidang dan lingkup ketahanan pangan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut juga mempunyai fungsi, yaitu :

- (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan;

2.2.1. Capaian Kinerja Organisasi

2.2.1.1. Analisis Kinerja Organisasi

a. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan

Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\%_{PRTC} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Jika semakin rendah realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\%_{PRTC} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Skala penilaian

Tabel 2.4
Skala Penilaian

No.	Interval nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat rendah

Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan), dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2020

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran stratejik diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun (2020)			Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan	1. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	78,6	78,6	100

Sumber: Renstra 2019-2024, Renja 2020, RKT 2020, dan PK 2020

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, terdapat 1(satu) sasaran strategis yang diukur melalui 1 (Satu) indikator sasaran.

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa indikator yang telah ditetapkan, pada tahun 2020 telah mencapai targetnya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut tahun 2020 sebesar 100 % (SANGAT TINGGI), yang dihitung berdasarkan persentase capaian sasaran.

c. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019-2020 dan target Renstra 2019-2024

Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019 – 2020 dan target Renstra Tahun 2019 - 2024 pada tabel 2.6.

Tabel 2.6
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019-2020 dan Target Renstra 2019-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi		Target Renstra
					2019	2020	
1	Meningkatkan Pemantapan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	77,8	78,6	82

Sumber: Renstra 2014-2020, Renja 2020, RKT 2020, dan PK 2020

d. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019-2020

Berikut disampaikan Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019-2020 yang merupakan perhitungan dari hasil realisasi kinerja pada tabel 2.7.

Tabel 2.7

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019-2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)		Percepatan (Perlambatan) (%)
				2019	2020	
1	Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	102,54	100	2,48

Sumber: Renstra 2019-2024, Renja 2020, RKT 2020, dan PK 2020

Tingkat Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang ditunjukkan pada tabel di atas, dapat dikatakan bahwa secara umum capaian indikator mengalami percepatan. Dari 1 (satu) indikator sasaran telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu 1) indikator Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dengan sasaran Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan masyarakat.

e. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2020 dengan Target Renstra Tahun 2019-2024

Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2020 dengan Target Renstra Tahun 2019-2024 pada tabel 2.8.

Tabel 2.8

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2020 dengan Target Renstra Tahun 2019-2024

No	Sasaran	Indikator	Capaian Tahun Lalu 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2020 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	77,8	78,6	78,6	100	82	95,85

f. Analisis Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan untuk kinerja tahun 2020 ditunjukkan dengan tercapainya target-target indikator yang telah ditetapkan, seperti ditunjukkan pada tabel 2.5, berikut kami sajikan dalam sorting data pada misi :

Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan dengan Tujuan Meningkatkan meningkatkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat dan sasaran Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan masyarakat.

Indikator yang mendukung misi tersebut, pada tahun 2020 mencapai target yang ditetapkan. Terdapat 1 (satu) indikator, yaitu : Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. Realisasi Indikator mencapai sebagaimana target yang ditentukan dalam dokumen perencanaan dalam realisasi dokumen perencanaan dimana realisasi Indikator Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi sebesar 78,6 poin dari target 78,6 poin. Hal ini berarti indikator sudah optimal pada target pencapaian.

Keberhasilan pencapaian indikator Dinas Ketahanan Pangan dari misi pertama dan kedua adalah berkat kontribusi/dukungan dan kerjasama berbagai pihak di lingkungan internal Dinas Ketahanan Pangan dan seluruh *stakeholders* pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Garut, yang dapat bersinergi dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.

Dengan pencapaian tersebut, bahwa kegagalan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan sepanjang tahun anggaran 2020 dapat dikatakan tidak terjadi atau dengan kata lain kegagalan kinerja dapat diminimalisir dan pelaksanaan kegiatan telah mengacu kepada dokumen perencanaan dengan indikator yang telah ditetapkan serta target yang realistis. Sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin.

g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2020 pada tabel 2.9.

Tabel 2.9

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	100	98,78	1,22

KET :

Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%

Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator

Tingkat efisiensi : capaian kinerja – penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut sepanjang Tahun Anggaran 2020 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator mencapai 100 % dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran.

h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2020 melaksanakan 33 kegiatan yang tercakup dalam 7 program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Perencanaan SKPD;
4. Program Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan;
5. Program Penguatan Distribusi dan Peningkatan Akses Pangan;
6. Program Peningkatan Kualitas dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
7. Program Peningkatan Keamanan Pangan.

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 1 (satu) indikator sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Periode Tahun 2019-2024 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja satu indikator Dinas Ketahanan Pangan

sebesar Rp. 1.164.412.505,- dari total anggaran Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp. 8.471.730.274,-

Berdasarkan data tahun anggaran 2020 pada program kegiatan utama Dinas Ketahanan Pangan yang ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja satu indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran.

Belanja daerah dari tahun 2019 tahun relatif mengalami kenaikan, tetapi pada awal tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 mengakibatkan target yang sudah ditetapkan mengalami perubahan karena penurunan pendapatan daerah, baik PAD, dana perimbangan, maupun pendapatan- pendapatan lain. Pada rancangan realisasi APBD Tahun 2020, bahwa realisasi belanja tetap mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2019 dikarenakan sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia tentang Penanganan COVID19 bahwa pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diminta agar fokus kepada 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1)Kesehatan masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID19,
- 2)Social safety net (jaring pengaman sosial) dalam bentuk bantuan sosial,
- 3)Memastikan kesiapan stok pangan di daerah masing-masing.

Hal tersebut dilaksanakan dengan memangkas rencana belanja yang tidak prioritas dalam APBD, anggaran perjalanan dinas, pertemuan- pertemuan dan belanja lain yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sehingga terdapat perubahan atau pengalihan alokasi dana dari pos Belanja Langsung kepada Belanja Tidak Terduga dalam bentuk bantuan baik tunai maupun non tunai.

Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Dinas Ketahanan Pangan secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2020 dari 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan realisasinya mencapai target.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan didalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2020.

Berikut tabel Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2020 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten seperti pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2020			Capaian (%)	Nama Program/Kegiatan	Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	78,6	78,6	100	Program Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan	146.270.000	146.270.000	100
							Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan	14.925.000	14.925.000	100
							Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	28.675.000	28.675.000	100
							Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Pangan	86.405.000	86.405.000	100
							Kegiatan Bank Pangan	16.265.000	16.265.000	100
							Program Penguatan Distribusi dan Peningkatan Akses Pangan	715.538.750	715.092.750	99,94
							Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	630.241.250	629.795.250	99,93
							Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Strategis	9.855.000	9.855.000	100
							Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat	75.442.500	75.442.500	100
							Program Peningkatan Kualitas dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	153.177.655	153.142.655	99,98
							Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	8.875.000	8.875.000	100
							Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	118.552.655	118.517.655	99,97

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2020			Capaian (%)	Nama Program/Kegiatan	Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
							Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	25.750.000	25.750.000	100
							Program Peningkatan Keamanan Pangan	149.426.100	149.426.100	100
							Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	28.790.000	28.790.000	100
							Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	108.556.000	108.556.000	100
							Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan	12.080.100	12.080.100	100

2.2.2. Kesimpulan Hasil Analisis Indikator Kinerja

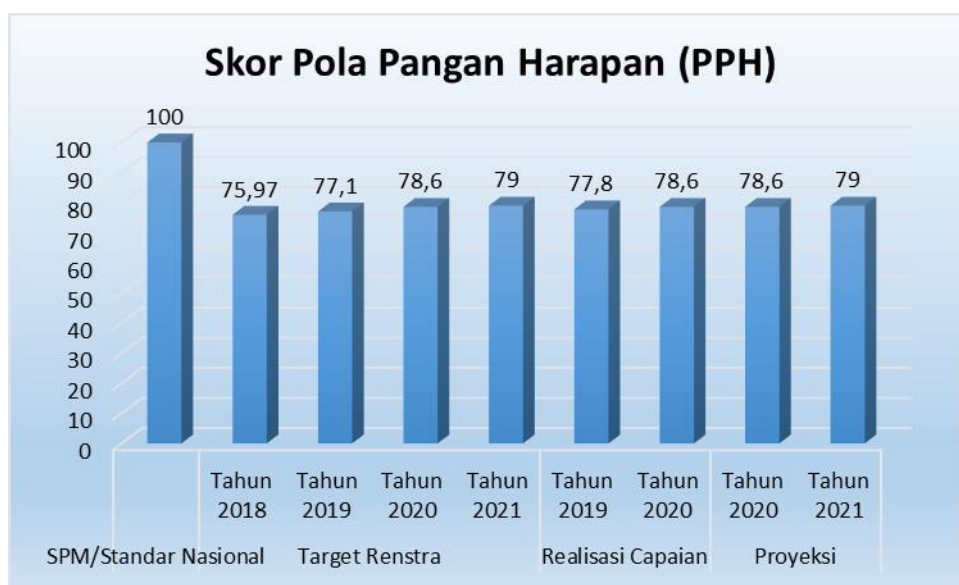
Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang diukur melalui 1 (satu) indikator Kinerja yaitu : Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang merupakan *Core Bussiness* Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.

Indikator kinerja tersebut merupakan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut sampai tahun 2020. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut tahun 2020 sebesar 102,54% yaitu masuk pada kategori SANGAT TINGGI. Hal ini membuktikan bahwa secara umum capaian kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut tahun 2020 telah tercapai.

Kesimpulan dari hasil analisis termasuk capaian kategori Sangat Tinggi tersebut dapat disajikan berdasarkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Adapun tujuannya adalah Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat dengan sasaran yaitu: Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan indikator Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.

Gambar 2.1
Hasil Analisis Indikator Kinerja



Pada gambar di atas terlihat bahwa realisasi capaian untuk Indikator Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi adalah 78,6 poin yaitu dari target 78,6 poin di tahun 2020 mencapai target yang ditentukan artinya pencapaian kinerja mencapai target yang telah ditentukan.

Meskipun capaian kinerja tahun 2020 maupun capaian akhir tahun Renstra telah mencapai target, namun masih jauh dari skor ideal PPH Konsumsi yakni 100 poin. Untuk mendukung pencapaian Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang ideal diperlukan upaya untuk mengoptimalkan peran serta dan koordinasi dari para pihak, baik OPD/Badan/Dinas di Instansi Pemerintah Kabupaten Garut maupun pihak lain yang tergabung dalam Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pencapaian kinerja adalah melalui penerapan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya Galura (Gerakan Lumbung Masyarakat), Silopang (Sistem Logistik Pangan), Promketapang (Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan), dan Darling Waspadalah (Kendaraan Keliling

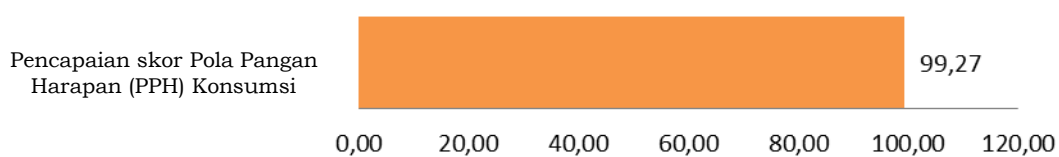
Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Penyuluhan Keamanan Pangans).

2.2.3. Realisasi Anggaran Indikator Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020

Realisasi Anggaran dalam mencapai Indikator Perjanjian Kinerja di Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.3

Realisasi Anggaran Pada Indikator Kinerja Tahun 2020



Dari grafik di atas dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran pada indikator sasaran di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan adalah sebesar 99,27%.

Tabel 2.11
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	100,00		75,97	77,1	78,6	79	77,8	78,6	78,6	79	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam kerangka penetapan kebijakan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, maka selain berdasarkan pada evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan pada tahun-tahun sebelumnya juga melihat beberapa hal yang perlu mendapat fokus perhatian dan dikategorikan sebagai isu strategis, sehingga penetapan kebijakan perencanaan program pembangunan di Kabupaten Garut dapat tepat sasaran serta mampu menjawab permasalahan yang terjadi dalam lingkup Dinas Ketahanan Pangan.

Adapun isu-isu strategis di dalam Dinas Ketahanan Pangan yang masih belum dapat ditanggulangi antara lain adalah :

1. Peningkatan ketersediaan pangan;
2. Penanganan kerawanan pangan;
3. Penguatan cadangan pangan;
4. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan;
5. Peningkatan Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan;
6. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat;
7. Peningkatan Keamanan Pangan Segar.

Sedangkan permasalahan urusan ketahanan pangan yang dihadapi antara lain adalah :

1. Belum optimalnya ketersediaan pangan di Kabupaten Garut;
2. Pola konsumsi masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA);
3. Belum optimalnya aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang baik dan bermutu;
4. Belum optimalnya tingkat keamanan pangan segar.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Perangkat Daerah. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar program dan kegiatan seluruh Perangkat Daerah dengan prediksi pagu anggaran indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Rancangan awal RKPD Kabupaten Garut tahun 2022 telah mulai disusun pada bulan Desember 2021. Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 terdapat 1 nomenklatur program generik dengan 30 kegiatan dan 4 program teknis dengan 20 kegiatan yang dicantumkan dalam RENJA Dinas Ketahanan Pangan, yaitu :

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan
I.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA /	<p>1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p> <p>6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</p> <p>7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</p> <p>3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>8 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</p> <p>4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>9 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</p> <p>10 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</p> <p>11 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p> <p>5) Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>12 Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</p> <p>15 Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>16 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>17 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>18 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>19 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>20 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>21 Pengadaan Mebel</p>

- 22 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 23 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 24 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 25 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 26 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 27 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 28 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 29 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 30 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**II. PROGRAM
PENGELOLAAN
SUMBER DAYA
EKONOMI UNTUK
KEDAULATAN DAN
KEMANDIRIAN
PANGAN**

- 1) **Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**
- 31 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
- 32 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
- 33 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
- 34 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
- 35 Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan

**III. PROGRAM
PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN
PANGAN
MASYARAKAT**

- 1) **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**
- 36 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
- 37 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

- 38 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
- 39 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
- 40 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
- 2) **Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**
- 41 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 3) **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**
- 42 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

**IV.PROGRAM
PENANGANAN
KERAWANAN
PANGAN**

- 1) **Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**
- 43 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
- 2) **Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**
- 44 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
- 45 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

**V.PROGRAM
PENGAWASAN
KEAMANAN
PANGAN**

- 1) **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**
- 46 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
- 47 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- 48 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- 49 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- 50 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 2.12
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Garut

Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan

Rancangan Awal RKPD									Hasil Analisa Kebutuhan							
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					
		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									27.608.168.718	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									13.225.151.918	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									121.001.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	7 Dokumen	Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	28 Dokumen	30.250.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	7 Dokumen	Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	21 Laporan	Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	28 Dokumen	30.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	21 Laporan	Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Hasil evaluasi kinerja	1 Laporan	Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	28 Dokumen	60.501.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Hasil evaluasi kinerja	1 Laporan	Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									5.722.744.386	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN DKP	1 Tahun	Terpenuhinya dokumen administrasi keuangan	43 Dokumen	5.671.043.386	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN DKP	1 Tahun	Terpenuhinya dokumen administrasi keuangan	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	Terpenuhinya dokumen administrasi keuangan	43 Dokumen	12.901.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	Terpenuhinya dokumen administrasi keuangan	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul,	Persentase pemenuhan	100,00%	Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	18 Laporan	Terpenuhinya dokumen	43 Dokumen	19.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul,	Persentase pemenuhan	100,00%	Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	18 Laporan	Terpenuhinya dokumen	

Rancangan Awal RKPD									Hasil Analisa Kebutuhan							
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					
		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sukagalih	kebutuhan dan pelayanan kantor		yang disusun		administrasi keuangan			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sukagalih	kebutuhan dan pelayanan kantor		yang disusun		adm keu	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Laporan dan prognosis realisasi anggaran yang disusun	12 Laporan	Terpenuhinya dokumen administrasi keuangan	43 Dokumen	19.400.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Laporan dan prognosis realisasi anggaran yang disusun	12 Laporan	Terp dok adm keu	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								113.595.932	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Penyediaan jasa keamanan kantor	1 Tahun	Terpenuhinya penyediaan jasa keamanan kantor	1 Tahun	113.595.932	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Penyediaan jasa keamanan kantor	1 Tahun	Terp pen kea	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								203.319.800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah sarana dan prasarana pendukung disiplin pegawai yang diadakan	1 Jenis	Terpenuhinya dokumen administrasi kepegawaian	3 Dokumen	7.156.100	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah sarana dan prasarana pendukung disiplin pegawai yang diadakan	1 Jenis	Terp dok adm kep	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah pakaian ASN yang diadakan	4 Jenis	Terpenuhinya dokumen administrasi kepegawaian	3 Dokumen	85.219.600	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah pakaian ASN yang diadakan	4 Jenis	Terp dok adm kep	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah sumberdaya pegawai yang ditingkatkan kualitasnya	46 Orang	Terpenuhinya dokumen administrasi kepegawaian	3 Dokumen	110.944.100	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah sumberdaya pegawai yang ditingkatkan kualitasnya	46 Orang	Terp dok adm kep	
Administrasi Umum Perangkat Daerah								517.671.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah peralatan listrik yang dibeli	5 Jenis	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	7 Jenis	3.697.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah peralatan listrik yang dibeli	5 Jenis	Terp pen keb	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	3 Jenis	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	7 Jenis	225.452.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	3 Jenis	Terp pen keb	

Rancangan Awal RKPD									Hasil Analisa Kebutuhan							
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					
		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	PPersentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	10 Jenis	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	7 Jenis	8.308.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	PPersentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	10 Jenis	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah penyediaan makan dan minum	1716 Box	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	7 Jenis	34.605.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah penyediaan makan dan minum	1716 Box	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan	2 Jenis	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	7 Jenis	47.318.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan	2 Jenis	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah majalah dan surat kabar yang berlangganan	96 Eksemplar	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	7 Jenis	10.075.200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah majalah dan surat kabar yang berlangganan	96 Eksemplar	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	7 Jenis	188.214.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								6.123.155.300	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang dibeli	1 Unit	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	8 Jenis	603.780.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang dibeli	1 Unit	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibeli	3 Unit	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	8 Jenis	112.476.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibeli	3 Unit	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	
Pengadaan Mebel	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah mebelair yang dibeli	1 Jenis	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	8 Jenis	182.309.300	Pengadaan Mebel	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah mebelair yang dibeli	1 Jenis	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah gedung/kantor/bangunan lainnya yang dibangun	1 Unit	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	8 Jenis	5.143.240.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah gedung/kantor/bangunan lainnya yang dibangun	1 Unit	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	

Rancangan Awal RKPD									Hasil Analisa Kebutuhan						
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				
		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah sarana dan prasarana gedung/kantor/bangunan lainnya yang diadakan	2 Jenis	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	8 Jenis	81.350.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah sarana dan prasarana gedung/kantor/bangunan lainnya yang diadakan	2 Jenis	Terpenuhinya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung/kantor/bangunan lainnya yang diadakan	2 Jenis	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	8 Jenis	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung/kantor/bangunan lainnya yang diadakan	2 Jenis	Terpenuhinya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								168.878.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Pemenuhan biaya tagihan telepon, air dan listrik	1 Tahun	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang yang dibutuhkan	5 Jenis	69.818.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Pemenuhan biaya tagihan telepon, air dan listrik	1 Tahun	Terpenuhinya
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	10 Unit	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang yang dibutuhkan	5 Jenis	16.060.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	10 Unit	Terpenuhinya
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 Tahun	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang yang dibutuhkan	5 Jenis	83.000.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 Tahun	Terpenuhinya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								254.785.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang terpelihara dan terbayarkan pajak	23 Unit	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah daerah	29 Unit	100.200.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang terpelihara dan terbayarkan pajak	23 Unit	Terpenuhinya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara dan terbayarkan pajak	4 Unit	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah daerah	29 Unit	13.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara dan terbayarkan pajak	4 Unit	Terpenuhinya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Gedung kantor yang terpelihara	1 Unit	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah daerah	29 Unit	90.995.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Gedung kantor yang terpelihara	1 Unit	Terpenuhinya

Rancangan Awal RKPD									Hasil Analisa Kebutuhan									
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja							
		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Target	Target	Target	Target
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	1 Unit	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah daerah	29 Unit	50.090.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kantor	100,00%	Sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	1 Unit	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah daerah			
								14.383.016.800										
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN								1.711.755.900	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN									
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								1.711.755.900	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Kab. Garut, Sukawening, Semua Kelurahan Kab. Garut, Cisarupan, Semua Kelurahan Kab. Garut, Banjarwangi, Semua Kelurahan Kab. Garut, Cisompet, Semua Kelurahan Kab. Garut, Cikelet, Semua Kelurahan Kab. Garut, Cisewu, Semua Kelurahan Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semua Kelurahan	Ketersediaan Energi Perkapita (kcal/kap/hari)	48,00%	Jumlah lumbung pangan yang dibangun	7 Unit	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	9 Unit	1.145.115.000	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Kab. Garut, Sukawening, Semua Kelurahan Kab. Garut, Cisarupan, Semua Kelurahan Kab. Garut, Banjarwangi, Semua Kelurahan Kab. Garut, Cisompet, Semua Kelurahan Kab. Garut, Cikelet, Semua Kelurahan Kab. Garut, Cisewu, Semua Kelurahan Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semua Kelurahan	Ketersediaan Energi Perkapita (kcal/kap/hari)	48,00%	Jumlah lumbung pangan yang dibangun	7 Unit	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan			
Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Kab. Garut, Pameungpeuk, Semua Kelurahan	Ketersediaan Energi Perkapita (kcal/kap/hari)	48,00%	Jumlah penyediaan lantai jemur	1 Unit	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	9 Unit	100.000.000	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Kab. Garut, Pameungpeuk, Semua Kelurahan	Ketersediaan Energi Perkapita (kcal/kap/hari)	48,00%	Jumlah penyediaan lantai jemur	1 Unit	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan			
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketersediaan Energi Perkapita (kcal/kap/hari)	48,00%	Belanja mesin pengolahan pangan Belanja sarana produksi pemanfaatan pekarangan Belanja usaha budidaya ikan	2 Jenis 10 Jenis 30000 Ekor	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	9 Unit	216.640.900	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketersediaan Energi Perkapita (kcal/kap/hari)	48,00%	Belanja mesin pengolahan pangan Belanja sarana produksi pemanfaatan pekarangan Belanja usaha budidaya ikan	2 Jenis 10 Jenis 30000 Ekor	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan			

Rancangan Awal RKPD								Hasil Analisa Kebutuhan								
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					
		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target
				Belanja usaha budidaya tanaman pangan	3 Jenis								Belanja usaha budidaya tanaman pangan	3 Jenis		
				Belanja usaha budidaya ternak	1 Jenis								Belanja usaha budidaya ternak	1 Jenis		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketersediaan Energi Perkapita (kcal/kap/hari)	48,00%	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilaksanakan	1 Kali	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	9 Unit	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketersediaan Energi Perkapita (kcal/kap/hari)	48,00%	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilaksanakan	1 Kali	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	
Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan		Ketersediaan Energi Perkapita (kcal/kap/hari)	48,00%	Jumlah laporan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Kemandirian Pangan	1 Laporan	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	9 Unit	150.000.000	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan		Ketersediaan Energi Perkapita (kcal/kap/hari)	48,00%	Jumlah laporan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Kemandirian Pangan	1 Laporan	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								10.992.114.250	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								970.716.000	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Stabilitas harga dan pasokan pangan	75,40%	Analisis Neraca Bahan Makanan yang disusun	1 Buku	Efisiensi distribusi pangan	33%	159.410.000	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Stabilitas harga dan pasokan pangan	75,40%	Analisis Neraca Bahan Makanan yang disusun	1 Buku	Efisiensi distribusi pangan	
				Informasi harga pangan yang disusun	1 Buku								Informasi harga pangan yang disusun	1 Buku		
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Garut, Banyuwangi, Semua Kelurahan Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semua Kelurahan	Stabilitas harga dan pasokan pangan	75,40%	Pengembangan sentra pangan lokal	4 Lokasi	Efisiensi distribusi pangan	33%	237.554.000	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Garut, Banyuwangi, Semua Kelurahan Kab. Garut, Bl. Limbangan, Semua Kelurahan	Stabilitas harga dan pasokan pangan	75,40%	Pengembangan sentra pangan lokal	4 Lokasi	Efisiensi distribusi pangan	
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Kelurahan	Stabilitas harga dan pasokan pangan	75,40%	Jumlah komoditi pangan yang dipantau	9 Komoditi	Efisiensi distribusi pangan	33%	65.632.000	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Kelurahan Kab. Garut, Samarang, Semua Kelurahan Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan Kab. Garut, Malangbong, Semua Kelurahan	Stabilitas harga dan pasokan pangan	75,40%	Jumlah komoditi pangan yang dipantau	9 Komoditi	Efisiensi distribusi pangan	
	Kab. Garut, Samarang, Semua Kelurahan			Jumlah lokasi pemantauan harga pangan	10 Lokasi								Jumlah lokasi pemantauan harga pangan	10 Lokasi		
	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan															
	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan															
	Kab. Garut, Malangbong, Semua Kelurahan															

Rancangan Awal RKPD									Hasil Analisa Kebutuhan									
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja							
		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Target	Target	Target	Target
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan								Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan									
	Kab. Garut, Cilawu, Semua Kelurahan								Kab. Garut, Cilawu, Semua Kelurahan									
	Kab. Garut, Cisarupan, Semua Kelurahan								Kab. Garut, Cisarupan, Semua Kelurahan									
	Kab. Garut, Cikajang, Semua Kelurahan								Kab. Garut, Cikajang, Semua Kelurahan									
	Kab. Garut, Pameungpeuk, Semua Kelurahan								Kab. Garut, Pameungpeuk, Semua Kelurahan									
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Stabilitas harga dan pasokan pangan	75,40%	Jumlah kelembagaan distribusi pangan yang dibina	20 Kelompok	Efisiensi distribusi pangan	33%	208.120.000	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Stabilitas harga dan pasokan pangan	75,40%	Jumlah kelembagaan distribusi pangan yang dibina	20 Kelompok	Efisiensi pan			
	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lokasi pemantauan distribusi pangan	10 Lokasi					Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lokasi pemantauan distribusi pangan	10 Lokasi				
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kab. Garut, Samarang, Semua Kelurahan	Stabilitas harga dan pasokan pangan	75,40%	Jumlah Gelar Pangan yang dilaksanakan	5 Kali	Efisiensi distribusi pangan	33%	300.000.000	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kab. Garut, Samarang, Semua Kelurahan	Stabilitas harga dan pasokan pangan	75,40%	Jumlah Gelar Pangan yang dilaksanakan	5 Kali	Efis			
	Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan			Jumlah kelembagaan usaha pangan yang dibina	4 Kelompok					Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan			Jumlah kelembagaan usaha pangan yang dibina	4 Kelompok				
	Kab. Garut, Cilawu, Semua Kelurahan									Kab. Garut, Cilawu, Semua Kelurahan								
	Kab. Garut, Cisarupan, Semua Kelurahan									Kab. Garut, Cisarupan, Semua Kelurahan								
	Kab. Garut, Cikajang, Semua Kelurahan									Kab. Garut, Cikajang, Semua Kelurahan								
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota								7.540.325.000	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota									
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Stabilitas harga dan pasokan pangan	26,00%	Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah	500 Ton	Terpenuhinya penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD)	500 Ton	7.540.325.000	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Stabilitas harga dan pasokan pangan	26,00%	Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah	500 Ton	Terpen	cad pen (CP		

Rancangan Awal RKPD									Hasil Analisa Kebutuhan									
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja							
		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi									2.481.073.250	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi								
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Garut, Karangpawitan, Godog	Stabilitas harga dan pasokan pangan	65,50%	Fasilitasi peningkatan pengolahan pangan lokal	8 Kelompok	Ratio konsumsi protein nabati terhadap total konsumsi ideal	12,6 %	2.481.073.250	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Garut, Karangpawitan, Godog	Stabilitas harga dan pasokan pangan	65,50%	Fasilitasi peningkatan pengolahan pangan lokal	8 Kelompok	Rat prot perh kon			
	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Rancabango			Pengembangan pangan lestari	10 Kelompok					Kab. Garut, Tarogong Kaler, Rancabango			Pengembangan pangan lestari	10 Kelompok				
	Kab. Garut, Banyuwesmi, Sukaraja			Promosi yang dilakukan	6 Kali					Kab. Garut, Banyuwesmi, Sukaraja			Promosi yang dilakukan	6 Kali				
	Kab. Garut, Pasirwangi, Padawaas									Kab. Garut, Pasirwangi, Padawaas								
	Kab. Garut, Leles, Canguang									Kab. Garut, Leles, Canguang								
	Kab. Garut, Kadungora, Gandamekar									Kab. Garut, Kadungora, Gandamekar								
	Kab. Garut, Sukawening, Maripari									Kab. Garut, Sukawening, Maripari								
	Kab. Garut, Cisarupan, Simpangsari									Kab. Garut, Cisarupan, Simpangsari								
	Kab. Garut, Cikajang, Padasuka									Kab. Garut, Cikajang, Padasuka								
	Kab. Garut, Selaawi, Samida									Kab. Garut, Selaawi, Samida								
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN									803.397.900	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan									250.000.000	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan								
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase penanganan daerah rawan pangan	8,14%	Jumlah Laporan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 Laporan	Laporan Analisa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 Laporan	250.000.000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase penanganan daerah rawan pangan	8,14%	Jumlah Laporan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 Laporan	Lap Pet dan Par			
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota									553.397.900	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota								
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	8,14%	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan yang dilaksanakan	4 Kali	Berkurangnya desa/lokasi/daerah rawan/rentan pangan	5 Lokasi	99.999.900	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	8,14%	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan yang dilaksanakan	4 Kali	Ber des raw pan			
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Malangbong, Sukajaya	Persentase penanganan daerah rawan pangan	8,14%	Jumlah daerah rentan pangan yang diintervensi	5 Lokasi	Berkurangnya desa/lokasi/daerah rawan/rentan pangan	5 Lokasi	453.398.000	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Malangbong, Sukajaya	Persentase penanganan daerah rawan pangan	8,14%	Jumlah daerah rentan pangan yang diintervensi	5 Lokasi	Ber des raw pan			
	Kab. Garut, Sukaesmi, Sukajaya									Kab. Garut, Sukaesmi, Sukajaya								

Rancangan Awal RKPD								Hasil Analisa Kebutuhan								
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja					
		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target
	Kab. Garut, Cisewu, Panggah								Kab. Garut, Cisewu, Panggah							
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								875.748.750	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota								875.748.750	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota							
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Wanaraja, Cinunuk	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	77,00%	Pelaku usaha pangan segar yang dibina	150 Orang	Meningkatnya produk pangan segar asal tumbuhan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan	15 Produk	101.800.000	Kab. Garut, Wanaraja, Cinunuk	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	77,00%	Pelaku usaha pangan segar yang dibina	150 Orang	Men pro seg tum mer mut kea		
	Kab. Garut, Wanaraja, Sindangprabu								Kab. Garut, Wanaraja, Sindangprabu							
	Kab. Garut, Samarang, Cintarakyat								Kab. Garut, Samarang, Cintarakyat							
	Kab. Garut, Kadungora, Cisaat								Kab. Garut, Kadungora, Cisaat							
	Kab. Garut, Kadungora, Tanggulun								Kab. Garut, Kadungora, Tanggulun							
	Kab. Garut, Malangbong, Citeras								Kab. Garut, Malangbong, Citeras							
	Kab. Garut, Malangbong, Baru Dua								Kab. Garut, Malangbong, Baru Dua							
	Kab. Garut, Bayongbong, Panembong								Kab. Garut, Bayongbong, Panembong							
	Kab. Garut, Bayongbong, Ciburuy								Kab. Garut, Bayongbong, Ciburuy							
	Kab. Garut, Cigedug, Cigedug								Kab. Garut, Cigedug, Cigedug							
	Kab. Garut, Cisarupan, Cisarupan								Kab. Garut, Cisarupan, Cisarupan							
	Kab. Garut, Cikajang, Girijaya								Kab. Garut, Cikajang, Girijaya							
	Kab. Garut, Cikajang, Cikandang								Kab. Garut, Cikajang, Cikandang							
	Kab. Garut, Mekarmukti, Mekarsari								Kab. Garut, Mekarmukti, Mekarsari							
	Kab. Garut, Caringin, Caringin								Kab. Garut, Caringin, Caringin							

Rancangan Awal RKPD									Hasil Analisa Kebutuhan						
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				
		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	77,00%	Jumlah Sertifikat Prima Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan	5 Produk	Meningkatnya produk pangan segar asal tumbuhan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan	15 Produk	146.083.000	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	77,00%	Jumlah Sertifikat Prima Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan	5 Produk	Men- pro- seg- tum- mer- mutu ke-
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	77,00%	Jumlah registrasi produk Pangan Segar Asal Tumbuhan	10 Produk	Meningkatnya produk pangan segar asal tumbuhan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan	15 Produk	125.982.000	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	77,00%	Jumlah registrasi produk Pangan Segar Asal Tumbuhan	10 Produk	Men- pro- seg- tum- mer- mutu ke-
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	77,00%	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	10 Produk	Meningkatnya produk pangan segar asal tumbuhan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan	15 Produk	104.100.000	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	77,00%	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	10 Produk	Men- pro- seg- tum- mer- mutu ke-
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	77,00%	Jumlah pengujian pangan	750 Sampel	Meningkatnya produk pangan segar asal tumbuhan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan	15 Produk	397.783.750	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	77,00%	Jumlah pengujian pangan	750 Sampel	Men- pro- seg- tum- mer- mutu ke-

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat *top down* saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara *top down* dan *bottom up*. Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Garut untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Pada Tahun 2022 ini terdapat beberapa usulan masyarakat untuk kegiatan Dinas Ketahanan Pangan yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD dan melalui Proposal Permohonan Bantuan. Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan dan meninjau lokasi kegiatan yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022, sesuai kriteria yang telah ditentukan. Rincian usulan masyarakat dan tindak lanjut hasil verifikasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Garut Tahun 2021

Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Perkiraan Biaya (Rp)	Catatan
I	Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan				5.550.000.000	
1	Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	1. Ds. Dunguswiru Kec. Limbangan	Jumlah lumbung pangan yang difasilitasi	1 Unit	55.000.000	RPTK
		2. Ds. Surabaya Kec. Limbangan		1 Unit	55.000.000	RPTK
		3. Ds. Cikembulan Kec. Kadungora		1 Unit	55.000.000	RPTK
		4. Ds. Karang Sari Kec. Lewigoong		1 Unit	55.000.000	RPTK
		5. Ds. Situsari Kec. Karangpawitan		1 Unit	55.000.000	RPTK
		6. Ds. Karyamukti Kec. Cibalong		1 Unit	55.000.000	RPTK
		7. Ds. Mekarwangi Kec. Cibalong		1 Unit	55.000.000	RPTK
		8. Ds. Selaawi Kec. Selaawi		1 Unit	55.000.000	RPTK
		9. Ds. Sukajaya Kec. Sukaresmi		1 Unit	55.000.000	RPTK
		10. Ds. Talagajaya Kec. Banjarwangi		1 Unit	55.000.000	RPTK

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Perkiraan Biaya (Rp)	Catatan
II	Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan				240.000.000	
1	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	1. Ds. Ciwangi Kec. Limbangan	Jumlah pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	1 Kelompok	30.000.000	RPTK
		2. Ds. Surabaya Kec. Limbangan		1 Kelompok	30.000.000	RPTK
		3. Ds. Padaawas Kec. Pasirwangi		1 Kelompok	30.000.000	RPTK
		4. Ds. Peundeuy Kec. Peundeuy		1 Kelompok	30.000.000	RPTK
		5. Ds. Pasirkiamis Kec. Pasirwangi		1 Kelompok	30.000.000	RPTK
		6. Ds. Talagajaya Kec. Banjarwangi		1 Kelompok	30.000.000	RPTK
		7. Ds. Selaawi Kec. Selaawi		1 Kelompok	30.000.000	RPTK
		8. Ds. Cintadamai Kec. Sukaresmi		1 Kelompok	30.000.000	RPTK
				JUMLAH	790.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional

3.1.1. Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Tahun 2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin meningkat;
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam tema **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”** dengan 7 agenda pembangunan, sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (*goals*) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan di atas.

Pembangunan ketahanan pangan termasuk ke dalam agenda pembangunan pertama yaitu **“Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas”** melalui peningkatan inovasi dan kualitas investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

1. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan

2. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dan dalam menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman dan perikanan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut akan didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Capaian pembangunan pada periode 2015-2019, pengelolaan pangan menunjukkan capaian produksi yang meningkat diantaranya surplus beras sekitar 2,8 juta ton pada tahun 2018 dan rata-rata pertumbuhan daging sebesar 5,5% per tahun. Produksi perikanan tangkap, termasuk di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) juga meningkat, mencapai 7,25 juta ton pada tahun 2018. Produksi perikanan budidaya juga meningkat menjadi 17,25 juta ton, yang mencakup 6,88 juta ton ikan budidaya (termasuk udang) dan 10,37 juta ton rumput laut. Selanjutnya produksi garam pada tahun 2018 adalah sebesar 2,72 juta ton.

Perbaikan produksi pangan juga didukung pembangunan infrastruktur tampungan air sebanyak 16 bendungan, serta rehabilitasi 788,6 ribu hektar lahan kritis. Konservasi kawasan perairan sebagai salah satu alat pengelolaan perikanan juga ditingkatkan luasannya menjadi 20,8 juta hektar atau sekitar 6,4 persen dari total luas wilayah perairan yang meliputi 172 kawasan pada tahun 2018.

Peningkatan pengelolaan dan produksi sumber pangan ini memungkinkan perbaikan kualitas konsumsi dan gizi masyarakat seperti ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 91,3/100, dan angka kerawanan pangan yang menurun menjadi 7,9 persen. Konsumsi ikan masyarakat juga terus meningkat dari 41,11 kg/kapita/tahun pada tahun 2015 menjadi 50,69 kg/kapita/tahun. Akses masyarakat ke sumber air minum yang layak juga meningkat menjadi 87,75 persen pada tahun 2018.

Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam.

Pengelolaan sumber daya pangan dan pertanian menghadapi isu semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan dan air sebagai dampak dari peningkatan aktivitas perekonomian. Kondisi ini menyebabkan peningkatan persaingan dalam pemanfaatan lahan dan air, khususnya di antara sektor pertanian, industri pengolahan, dan perumahan.

Isu lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kebutuhan pangan seiring dengan peningkatan populasi penduduk sebesar 1,2 persen. Di sisi lain, produksi pangan sangat juga dipengaruhi oleh faktor musim, serta ketersediaan dan kehandalan sarana prasarana produksi termasuk irigasi. Ketidakpastian produksi menyebabkan fluktuasi harga

pangan, misalnya beras rata-rata 0,6 persen per bulan. Dari sisi produsen, produktivitas yang rendah dan fluktuasi harga menyebabkan daya tawar petani (nilai tukar petani) masih rendah yaitu sebesar rata-rata 101,3 pada tahun 2017.

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Pembangunan ketahanan pangan dan pertanian masuk pada sasaran pertama yaitu Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan dengan 20 indikator sasaran sebagai berikut :

1. Skor Pola Pangan Harapan;
2. Angka Kecukupan Energi (AKE);
3. Angka Kecukupan Protein (AKP);
4. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*);
5. Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (*Food Insecurity Experience Scale/FIES*);
6. *Global food security index*;
7. Produksi padi (gabah kering giling);
8. Produksi jagung;
9. Produksi daging;
10. Produksi umbi-umbian;
11. Konsumsi ikan;
12. Konsumsi daging
13. Konsumsi protein asal ternak;
14. Konsumsi sayur dan buah;
15. Luas lahan Produksi beras biofortifikasi;

16. Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas;
17. Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia;
18. Tingkat adopsi teknologi pertanian oleh petani;
19. Nilai tambah per tenaga kerja pertanian;
20. Nilai tukar petani.

Arah kebijakan yang ditempuh adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan yang akan dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; (2) meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok; (3) meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian dan kepastian pasar; (4) menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, digitalisasi pertanian, pengelolaan lahan dan air irigasi; (5) meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional.

Pelaksanaan dari strategi pertama mencakup pengembangan benih padi biofortifikasi, fortifikasi beras, pengembangan nanoteknologi pangan, pengembangan pangan lokal, dan diversifikasi bahan pangan di tingkat masyarakat. Fasilitasi budidaya padi, jagung, ternak dan komoditas pangan strategis serta penyediaan input produksi diantaranya sistem perbenihan nasional pupuk bersubsidi yang tepat sasaran menjadi fokus pelaksanaan dari strategi kedua.

Strategi ketiga mencakup penguatan basis data petani, pembentukan korporasi petani, asuransi pertanian, pelatihan dan penyuluhan. Strategi keempat mencakup pengelolaan lahan, termasuk lahan suboptimal, low land, upland, dan lahan kering, efisiensi air, pertanian digital dan penggunaan teknologi pesawat nirawak. Strategi kelima mencakup

penguatan sistem logistik pangan nasional, integrasi sistem data produksi pangan nasional dan data ekspor impor produk pangan strategis, pengembangan resi gudang, pengelolaan sistem pangan berkelanjutan dan sistem pangan perkotaan (urban food) serta pengelolaan limbah pangan (food waste).

Pengelolaan sumber daya pangan akan difokuskan pada (1) daerah sentra produksi dan daerah dengan tingkat permintaan tinggi di Sumatera, Jawa dan Sulawesi; dan (2) daerah yang rentan kelaparan dan stunting, dan daerah miskin dan perbatasan di Maluku dan Papua.

3.1.2. Kebijakan Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian pada tahun 2020-2024 merumuskan Visi “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dengan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian

Tujuan pembangunan pertanian 2020-2024 adalah :

- a. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan
- b. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian,
- c. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

Sasaran strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 adalah :

- a. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri
- b. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional
- c. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
- d. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian
- e. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan

- f. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan
- g. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional
- h. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
- i. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Visi Badan Ketahanan Pangan Pusat Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Ketahanan Pangan yang berlandaskan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan”. Misi Badan Ketahanan Pangan adalah :

- a. Memantapkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan.
- b. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan.
- c. Mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
- d. Mewujudkan pangan segar yang aman dan bermutu.

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

- a. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal.
- b. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan.
- c. Memperkuat sistem distribusi pangan.
- d. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal.
- e. Meningkatkan penanganan keamanan dan mutu pangan segar.

Sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan Pusat adalah :

- a. Meningkatnya Lembaga Distribusi Pangan yang Mandiri
- b. Meningkatnya penanganan kerawanan pangan
- c. Meningkatnya pengawasan pangan segar yang beredar

- d. Meningkatnya konsumsi sayur, buah dan daging
- e. Terwujudnya Birokrasi Badan Ketahanan Pangan yang efektif dan efisien,

Kebijakan Badan Ketahanan Pangan Pusat adalah :

- a. peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumberdaya lokal
- b. memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan

Strategi Badan Ketahanan Pangan Pusat adalah :

- a. Memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk (1) meningkatkan kapasitas produksi pangan domestik, (2) menyediakan lapangan kerja, dan (3) meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. Pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat terutama masyarakat miskin kronis dan transien (akibat bencana alam, sosial, dan ekonomi) melalui pendistribusian bantuan pangan;
- c. Pemberdayaan masyarakat supaya mampu memanfaatkan pangan berimbang, bergizi, sehat dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- d. Penanganan keamanan dan mutu pangan segar.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan Pusat melaksanakan satu program prioritas yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang dijabarkan dalam empat kegiatan yaitu :

- a. Pemantapan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan melalui :
 - Penyusunan dan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM);
 - Penyusunan dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Peta FSVA);
 - Implementasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), serta intervensi dan mitigasi penanganan rawan/kurang Pangan;

- Pemberdayaan Kawasan Mandiri Pangan;
 - Kajian Responsif dan Antisipatif;
 - Pemantauan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- b. Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil, melalui:
- Pemberdayaan petani kecil dan gender;
 - Pengembangan rantai nilai tanaman perkebunan;
 - Pengembangan pemasaran dan produksi pertanian;
- c. Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Distribusi dan Cadangan Pangan serta Stabilitas Harga Pangan, melalui:
- Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM);
 - Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat (LPM);
 - Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI);
 - Pemantauan pasokan harga pangan menghadapi hari besar keagamaan nasional (HBKN);
 - Pemantauan pasokan, harga, distribusi dan cadangan pangan serta tindaklanjut gejolak harga pangan;
 - Kajian Responsi dan Antisipatif Distribusi Pangan;
 - Kajian Distribusi Pangan.
- d. Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan, melalui:
- Pemberdayaan pekarangan pangan;
 - Advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi tentang konsumsi pangan lokal kepada aparat dan masyarakat;
 - Pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - Analisis pola konsumsi dan kebutuhan konsumsi pangan;
 - Pengembangan usaha pengolahan pangan lokal UMKM dan rumah tangga;
 - Pengawasan keamanan dan mutu pangan

3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan tahun

kedua pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan bersumber dari Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 disajikan sebagai berikut.

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

Jawa Barat Juara Lahir Batin: Pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.

Inovasi: Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi: Perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai peranan yang strategis dengan mengemban misi keempat, yaitu Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan dengan sasaran Jawa Barat sebagai

daerah pertanian, perikanan dan kelautan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan.

Sektor pertanian terkena dampak pandemi COVID-19 paling kecil dibandingkan sektor lain. Hal ini terjadi karena dampak dari pembatasan sosial akan relatif minimal pada sektor pertanian, walaupun masih ada resiko dari disrupsi rantai penawaran (supply chain) dan terpuruknya permintaan.

Ketahanan pangan mencakup ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan penganekaragaman pangan dan pengutamakan produksi pangan, keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, dan pendistribusian pangan pokok. Salah satu upaya untuk pemulihan ekonomi akibat COVID-19, dibutuhkan reformasi ketahanan pangan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu:

a. Ketersediaan Pangan

Mendorong peningkatan produksi dan pasokan pangan, yakni melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan, penggunaan teknologi yang bersifat sustainable dan pemberdayaan masyarakat bersifat padat karya.

b. Akses Pangan

1) Meningkatkan distribusi, logistik, dan perbaikan tata niaga pangan, yakni melalui:

a) Pembenahan distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada penerapan sistem logistik dan distribusi yang terintegrasi, termasuk koordinasi antardaerah dan pengembangan Toko Tani Indonesia (TTI);

b) Optimalisasi BUMD untuk meningkatkan distribusi komoditas pangan antardaerah terutama dari daerah surplus kepada daerah defisit pangan;

Pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung optimalisasi distribusi pangan; dan

c) Pengaturan distribusi pangan melalui penguatan pengaturan oleh pemerintah, serta penetapan kebijakan impor yang tepat waktu dengan dukungan data sistem logistik dan distribusi.

2) Membenahi struktur pasar, melalui:

a) Penguatan pengaturan distribusi pangan oleh pemerintah, melalui pengaturan pelaku usaha distribusi terdaftar, dan monitoring harga; dan

b) Optimalisasi peran BULOG sebagai lembaga penyangga untuk mendukung stabilisasi harga pangan, serta penyediaan alternatif pasokan komoditas strategis seperti jagung, serta penguatan pemantauan harga dan pasokan dengan dukungan sistem informasi dan harga yang terintegrasi, terutama menjelang hari besar keagamaan nasional.

3) Pemanfaatan Pangan

a) Mendorong pemanfaatan pangan untuk memenuhi kebutuhan individu secara biologik, psikologik, maupun sosial.

b) Optimalisasi pemanfaatan pangan dalam meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat;

c) Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif;

d) Memperbaiki status gizi masyarakat; dan

e) Menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan.

Untuk mencapai sasaran dimaksud, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat adalah Pemenuhan ketersediaan pangan dengan indikator Skor PPH tingkat ketersediaan dan Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP).

Sasaran yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pangan dan gizi dengan indikator tingkat konsumsi energi dan protein;
2. Meningkatnya produksi peternakan dengan indikator produksi komoditas daging, telur dan susu.

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat telah selaras dengan tujuan, sasaran serta tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut. Dengan keselarasan tersebut maka peluang untuk mendapatkan dukungan program/kegiatan pendanaan dari provinsi dalam mencapai sasaran yang ditetapkan sangat besar.

3.3. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut

Secara Teoritik, perumusan rencana kerja terlebih dahulu diawali oleh proses analisis mendalam terhadap persoalan yang muncul atau diperkirakan terdapat dalam dinamika pencapaian visi dan misi. Oleh karenanya perumusan masalah yang telah, sedang maupun yang akan dihadapi menjadi suatu hal yang tidak boleh dihindari, agar senantiasa dapat terjaga korelasi yang positif antara visi, misi serta kebijakan yang tepat untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Demikian juga, tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah harus selaras dan sesuai dengan visi, misi, strategi dan kebijakan pemerintah kabupaten dalam hal ini Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada maka Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut adalah ***“Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”***.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan

datang, diharapkan Kabupaten Garut dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional maupun nasional. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.

- Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang Tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

- Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya;

2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;

3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;

4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian dan pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Untuk mendukung visi “Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”, yang dijabarkan dalam misi keempat yaitu “Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian dan pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan”, maka sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat” dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan, maka tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut yang hendak dicapai dari pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2024 adalah “Meningkatkan keterjangkauan dan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat” dengan indikator Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil.

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2019- 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan energi dan protein perkapita yang diukur dari pencapaian ketersediaan energi dan protein perkapita;

2. Meningkatnya akses serta pengendalian distribusi dan harga pangan yang diukur dari stabilitas harga dan

pasokan pangan (CV) komoditas beras, cabe merah dan bawang merah;

3. Meningkatnya konsumsi energi dan protein perkapita yang diukur dari pencapaian konsumsi energi dan protein perkapita;

4. Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yang diukur dari persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan;

5. Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja yang diukur dari hasil evaluasi AKIP.

Strategi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas pangan dan gizi masyarakat yang ditempuh melalui langkah-langkah Peningkatan ketersediaan pangan, menjaga stabilitas harga dan kualitas konsumsi pangan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Garut Tahun 2014 - 2019, ditetapkan kebijakan pembangunan ketahanan pangan sebagai berikut :

1. Peningkatan penganekaragaman pangan yang bergizi, seimbang dan aman;
2. Peningkatan ketersediaan protein hewani;
3. Pemantapan kemandirian pangan;
4. Optimalisasi peran satgas pangan dan dewan ketahanan pangan;
5. Pengaturan distribusi hasil pertanian.

3.4. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2022 adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan ketahanan pangan.

Sasaran Rencana Kerja (Renja) adalah tersusunnya dokumen tahunan Dinas Ketahanan Pangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perencanaan strategis (Renstra)

Dinas Ketahanan Pangan 2019 - 2024 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 - 2024 dan RKPD Tahun 2021.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2022 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Garut Tahun 2022

Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target
1. Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Poin)	80	1. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Poin)	80
			2. Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja	Hasil evaluasi AKIP (Nilai)	BB

3.5. Program dan Kegiatan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut dalam pelaksanaannya mempunyai beberapa program yang termuat dalam RPJMD sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Disamping berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut tahun 2019 – 2024, dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut merencanakan 5 (lima) program dan 15 (lima belas) kegiatan dan 51 (lima puluh satu) sub kegiatan yang berkaitan dengan bidang Ketahanan Pangan yaitu :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.3 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 2.4 Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - 3.1 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 4.1 Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 4.2 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 4.3 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

5.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5.5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

5.6 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

5.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

6.2 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

6.3 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

6.4 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6.5 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6.6 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

8.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

8.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

8.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

1. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan

1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur

1.3 Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik

Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan

III. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

1.3 Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan

1.4 Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan

1.5 Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

1.1 Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

1. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

IV. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

1. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

1.1 Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

2. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

2.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota

2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Sub Kegiatan Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

V. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

1.2 Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

1.3 Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

1.4 Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

1.5 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.2.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama OPD : 2.03.01. -Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						22.608.168.718			24.391.384.095			
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8.225.151.918			8.387.365.895			
2	09	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						121.001.000			127.050.000			
2	09	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	7 Dokumen	28 Dokumen	30.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	100,00 %	31.762.500
2	09	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	21 Laporan	28 Dokumen	30.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	100,00 %	31.762.500
2	09	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	Hasil evaluasi kinerja	Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 Laporan	28 Dokumen	60.501.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	100,00 %	63.525.000
2	09	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.722.744.386			6.005.415.555			
2	09	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan pelaporan capaian	Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN DKP	Terpenuhinya dokumen administrasi keuangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	1 Tahun	43 Dokumen	5.671.043.386	Dana Transfer Umum-Dana	Persentase pemenuhan pelaporan capaian	100,00 %	5.954.595.555

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
		kinerja dan keuangan sesuai ketentuan								Alokasi Umum		kinerja dan keuangan sesuai ketentuan						
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Terpenuhinya dokumen administrasi keuangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	1 Laporan	43 Dokumen	12.901.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00 %	12.705.000
2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun	Terpenuhinya dokumen administrasi keuangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	18 Laporan	43 Dokumen	19.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00 %	19.057.500
2	09	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pemenuhan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Laporan dan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Terpenuhinya dokumen administrasi keuangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	12 Laporan	43 Dokumen	19.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00 %	19.057.500
2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							113.595.932					129.609.000	
2	09	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa keamanan kantor	Terpenuhinya penyediaan jasa keamanan kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	1 Tahun	1 Tahun	113.595.932	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	129.609.000
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							203.319.800					242.665.500	
2	09	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana pendukung disiplin pegawai yang diadakan	Terpenuhinya dokumen administrasi kepegawaian	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	1 Jenis	3 Dokumen	7.156.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	12.705.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target				
2	09	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah pakaian ASN yang diadakan	Terpenuhinya dokumen administrasi kepegawaian	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	4 Jenis	3 Dokumen	85.219.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	102.910.500
2	09	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah sumberdaya pegawai yang ditingkatkan kualitasnya	Terpenuhinya dokumen administrasi kepegawaian	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	46 Orang	3 Dokumen	110.944.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	127.050.000
2	09	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										517.671.800			540.719.120
2	09	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan listrik yang dibeli	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	5 Jenis	7 Jenis	3.697.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	3.375.750
2	09	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	3 Jenis	7 Jenis	225.452.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	233.666.500
2	09	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	10 Jenis	7 Jenis	8.308.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	8.743.350
2	09	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah penyediaan makan dan minum	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	1716 Box	7 Jenis	34.605.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	36.336.300
2	09	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	2 Jenis	7 Jenis	47.318.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	49.684.600

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target				
2	09	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah majalah dan surat kabar yang berlangganan	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	96 Eksemplar	7 Jenis	10.075.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	11.264.400
2	09	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	1 Tahun	7 Jenis	188.214.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	197.648.220
2	09	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1.123.155.300				862.287.825		
2	09	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang dibeli	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	1 Unit	8 Jenis	603.780.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	307.362.825
2	09	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibeli	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	3 Unit	8 Jenis	112.476.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	38.850.000
2	09	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah mebel/air yang dibeli	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	1 Jenis	8 Jenis	182.309.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	190.575.000
2	09	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah gedung/kantor/bangunan lainnya yang dibangun	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	1 Unit	8 Jenis	143.240.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	157.500.000
2	09	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana gedung/kantor/bangunan lainnya yang diadakan	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	2 Jenis	8 Jenis	81.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	89.250.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	09	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung/kantor/bangunan lainnya yang diadakan	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	2 Jenis	8 Jenis	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	78.750.000
2	09	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						168.878.200				177.446.745			
2	09	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Pemenuhan biaya tagihan telepon, air dan listrik	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang yang dibutuhkan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	1 Tahun	5 Jenis	69.818.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	73.341.345
2	09	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang yang dibutuhkan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	10 Unit	5 Jenis	16.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	16.863.000
2	09	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang yang dibutuhkan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	1 Tahun	5 Jenis	83.000.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	87.242.400
2	09	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						254.785.500				302.172.150			
2	09	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang terpelihara dan terbayarkan pajak	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	23 Unit	29 Unit	100.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	111.597.150
2	09	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara dan terbayarkan pajak	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	4 Unit	29 Unit	13.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	16.275.000
2	09	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi	Gedung kantor yang terpelihara	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	1 Unit	29 Unit	90.995.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi	100,00 %	95.550.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
		perkantoran								Umum		perkantoran					
2	09	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	1 Unit	29 Unit	50.090.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	78.750.000
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN						1.711.755.900				1.901.245.000		
2	09	02	2,01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						1.711.755.900				1.901.245.000		
2	09	02	2,01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Persentase peningkatan stok pangan utama di lumbung pangan masyarakat	Jumlah lumbung pangan yang difasilitasi	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	Kab. Garut, Karangpawita n, Sitasari Kab. Garut, Kadungora, Cikembulan Kab. Garut, Leuwigoong, Karanganyar Kab. Garut, Sukawening, Maripari Kab. Garut, Bayongbong, Banjarsari Kab. Garut, Cisarupan, Sirnajaya Kab. Garut, Sukaresmi, Sukajaya Kab. Garut, Banjarwangi, Talagajaya Kab. Garut, Singajaya, Sukawangi Kab. Garut, Cikelet, Girimukti Kab. Garut, Bl. Limbangan, Surabaya Kab. Garut, Bl. Limbangan, Dunguswiru Kab. Garut, Selaawi, Selaawi	48,00 %	13 Unit	9 Unit	1.145.115.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan stok pangan utama di lumbung pangan masyarakat	48,00 %	1.312.850.000
2	09	02	2,01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Persentase peningkatan stok pangan utama di lumbung pangan masyarakat	Jumlah penyediaan lantai jemur	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	Kab. Garut, Pameunpeuk, Pameunpeuk Kab. Garut, Cisompet, Panyindangan	48,00 %	2 Unit	9 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan stok pangan utama di lumbung pangan masyarakat	48,00 %	100.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	09	02	2,01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Persentase peningkatan stok pangan utama di lumbung pangan masyarakat	Belanja mesin pengolahan pangan Belanja sarana produksi pemanfaatan pekarangan Belanja usaha budidaya ikan Belanja usaha budidaya tanaman pangan Belanja usaha budidaya ternak	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	Kab. Garut, Mekarmukti, Karangwangi Kab. Garut, Bl. Limbangan, Dunguswiru	48,00 %	2 Jenis 10 Jenis 30000 Ekor 3 Jenis 1 Jenis	9 Unit	216.640.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan stok pangan utama di lumbung pangan masyarakat	48,00 %	238.395.000
2	09	02	2,01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Persentase peningkatan stok pangan utama di lumbung pangan masyarakat	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilaksanakan	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,00 %	1 Kali	9 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan stok pangan utama di lumbung pangan masyarakat	48,00 %	100.000.000
2	09	02	2,01	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Persentase peningkatan stok pangan utama di lumbung pangan masyarakat	Jumlah laporan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Kemandirian Pangan	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan		48,00 %	1 Laporan	9 Unit	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan stok pangan utama di lumbung pangan masyarakat	48,00 %	150.000.000
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							10.992.114.250				12.101.642.700		
2	09	03	2,01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							970.716.000					1.005.353.700	
2	09	03	2,01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Persentase ketersediaan informasi harga pangan	Analisis Neraca Bahan Makanan yang disusun Informasi harga pangan yang disusun	Efisiensi distribusi pangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	75,40 %	1 Buku 1 Buku	33 %	159.410.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan informasi harga pangan	75,40 %	150.000.000
2	09	03	2,01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase ketersediaan informasi harga pangan	Pengembangan sentra pangan lokal	Efisiensi distribusi pangan	Kab. Garut, Sukawening, Pasanggrahan Kab. Garut, Singajaya, Cigintung Kab. Garut, Selaawi, Samida	75,40 %	4 Lokasi	33 %	237.554.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan informasi harga pangan	75,40 %	261.311.600
2	09	03	2,01	04	Pemantauan Stok,	Persentase	Jumlah komoditi pangan	Efisiensi distribusi	Kab. Garut, Wanaraja,	75,40 %	9 Komoditi	33 %	65.632.000	Dana		Persentase	75,40	65.110.100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
	Pasokan dan Harga Pangan	ketersediaan informasi harga pangan	yang dipantau Jumlah lokasi pemantauan harga pangan	pangan	Semua Kelurahan Kab. Garut, Samarang, Semua Kelurahan Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan Kab. Garut, Malangbong, Semua Kelurahan Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan Kab. Garut, Cilawu, Semua Kelurahan Kab. Garut, Cisarupan, Semua Kelurahan Kab. Garut, Cikajang, Semua Kelurahan Kab. Garut, Pameungpeuk, Semua Kelurahan		10 Lokasi				Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ketersediaan informasi harga pangan	%				
2	09	03	2,01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Persentase ketersediaan informasi harga pangan	Jumlah kelembagaan distribusi pangan yang dibina Jumlah lokasi pemantauan distribusi pangan	Efisiensi distribusi pangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,40 %	20 Kelompok 10 Lokasi	33 %	208.120.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan informasi harga pangan	75,40 %	228.932.000
2	09	03	2,01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Persentase ketersediaan informasi harga pangan	Jumlah Gelar Pangan yang dilaksanakan Jumlah kelembagaan usaha pangan yang dibina	Efisiensi distribusi pangan	Kab. Garut, Samarang, Semua Kelurahan Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan Kab. Garut, Cilawu, Semua Kelurahan Kab. Garut, Cisarupan, Semua Kelurahan Kab. Garut, Cikajang, Semua Kelurahan	75,40 %	5 Kali 4 Kelompok	33 %	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan informasi harga pangan	75,40 %	300.000.000
2	09	03	2,02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						7.540.325.000						8.294.357.000	
2	09	03	2,02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase penguatan penyediaan cadangan pangan pemerintah	Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah	Terpenuhinya penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD)	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,00 %	500 Ton	500 Ton	7.540.325.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penguatan penyediaan cadangan pangan pemerintah	26,00 %	8.294.357.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	09	03	2,04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					2.481.073.250				2.801.932.000			
2	09	03	2,04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tingkat konsumsi Sayur dan Buah	Fasilitasi peningkatan pengolahan pangan lokal Pengembangan pangan lestari Promosi yang dilakukan	Ratio konsumsi protein nabati terhadap total konsumsi ideal	Kab. Garut, Garut Kota, Kota Wetan Kab. Garut, Garut Kota, Sukanegla Kab. Garut, Tarogong Kaler, Sukawangi Kab. Garut, Leles, Margaluyu Kab. Garut, Leuwigoong, Sindangsari Kab. Garut, Cibatu, Cibunar Kab. Garut, Malangbong, Campaka Kab. Garut, Bayongbong, Mulyasari Kab. Garut, Cilawu, Karyamekar Kab. Garut, Cisurupan, Pamulihan Kab. Garut, Banjarwangi, Talagajaya Kab. Garut, Pameungpeuk, Bojong Kidul Kab. Garut, Cisompet, Jatisari Kab. Garut, Cikelet, Cikelet Kab. Garut, Bungbulang, Sinarjaya Kab. Garut, Mekarmukti, Mekarsari Kab. Garut, Bl. Limbangan, Surabaya Kab. Garut, Pangatikan, Sukahurip	65,50 %	8 Kelompok 10 Kelompok 6 Kali	12,6 %	2.481.073.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat konsumsi Sayur dan Buah	65,50 %	2.801.932.000
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					803.397.900				848.737.800			
2	09	04	2,01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan					250.000.000				250.000.000			
2	09	04	2,01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Persentase penurunan daerah rawan pangan	Jumlah Laporan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Laporan Analisa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	8,14 %	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penurunan daerah rawan pangan	8,14 %	250.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	09	04	2,02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota								598.737.800					
2	09	04	2,02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase penurunan daerah rawan pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan yang dilaksanakan	Berkurangnya desa/lokasi/daerah rawan/rentan pangan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,14 %	4 Kali	5 Lokasi	99.999.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penurunan daerah rawan pangan	8,14 %	100.000.000	
2	09	04	2,02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan daerah rawan pangan	Jumlah daerah rentan pangan yang diintervensi	Berkurangnya desa/lokasi/daerah rawan/rentan pangan	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Pasawahan Kab. Garut, Malangbong, Sukajaya Kab. Garut, Sukaresmi, Sukajaya Kab. Garut, Banjarwangi, Kadongdong Kab. Garut, Singajaya, Sukawangi Kab. Garut, Cisewu, Panggalih	8,14 %	6 Lokasi	5 Lokasi	453.398.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penurunan daerah rawan pangan	8,14 %	498.737.800	
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								875.748.750				1.152.392.700	
2	09	05	2,01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota								875.748.750					1.152.392.700
2	09	05	2,01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	Pelaku usaha pangan segar yang dibina	Meningkatnya produk pangan segar asal tumbuhan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan	Kab. Garut, Wanaraja, Cinunuk Kab. Garut, Wanaraja, Sindangprabu Kab. Garut, Samarang, Cintarakyat Kab. Garut, Kadungora, CisaatKab. Garut, Kadungora, Tanggulun Kab. Garut, Malangbong, CiterasKab. Garut, Malangbong, Baru Dua Kab. Garut, Bayongbong, Panembong Kab. Garut, Bayongbong, CiburuyKab. Garut, Cigedug, Cigedug Kab. Garut, Cisarupan, Cisarupan Kab. Garut, Cikajang, Girijaya Kab. Garut, Cikajang, Cikandang Kab. Garut, Mekarmukti, Mekarsari Kab. Garut,	77,00 %	150 Orang	15 Produk	101.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	77,00 %	111.986.700	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
					Caringin, Caringin												
2	09	05	2,01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	Jumlah Sertifikat Prima Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan	Meningkatnya produk pangan segar asal tumbuhan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,00 %	5 Produk	15 Produk	146.083.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	77,00 %	200.172.000
2	09	05	2,01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	Jumlah registrasi produk Pangan Segar Asal Tumbuhan	Meningkatnya produk pangan segar asal tumbuhan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,00 %	10 Produk	15 Produk	125.982.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	77,00 %	200.172.000
2	09	05	2,01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Meningkatnya produk pangan segar asal tumbuhan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,00 %	10 Produk	15 Produk	104.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	77,00 %	200.172.000
2	09	05	2,01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	Jumlah pengujian pangan	Meningkatnya produk pangan segar asal tumbuhan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,00 %	750 Sampel	15 Produk	397.783.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	77,00 %	439.890.000
TOTAL													22.608.168.718				24.391.384.095

Gerakan Besar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut



Gambar 3.1.
Gerakan Besar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut

1. Gerakan Lumbung Pangan Masyarakat (GALURA)

Gerakan Lumbung Pangan Masyarakat adalah gerakan yang dirancang untuk menumbuh kembangkan ketersediaan pangan yang beragam disuatu wilayah, kelompok hingga perseorangan dengan cara memadukan unsur-unsur komoditas, manusia secara keseluruhan dan kelembagaan masyarakat sebagai wadah untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan Galura sehingga secara kuantitas dan kualitas dapat terlihat manfaat yang berkelanjutan melalui pengembangan lumbung pangan, pengembangan sumberdaya pangan, pengembangan desa mandiri pangan, pengembangan Bank Pangan.

Permasalahan yang dihadapi sehingga timbulnya gerakan ini, antara lain :

- 1) Kebutuhan pangan selalu meningkat, sejalan dengan pertumbuhan penduduk, namun disisi lain peningkatan produksi pangan kita, kurang bisa mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.
- 2) Alih fungsi lahan tidak terkendali, sehingga cukup mengkhawatirkan akan terjadi ketidak seimbangan antara kebutuhan dengan ketersediaan pangan.

- 3) Buruh Tani, Petani Gurem pengangguran, orang miskin (rumah tangganya kurang ketersediaan pangannya
- 4) Distribusi pangan daerah yang tidak terpantau, produksi lokal mengalir keluar.
- 5) Kurangnya kelembagaan Pangan yang mendukung Ketersediaan pangan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pangan.
- 6) Spekulasi/ bandar-bandar / kartal-kartal sehingga ketersediaan wilayah banyak mengalir keluar daerah
- 7) Informasi pasar yang kurang sehingga pangan dijual dengan harga yang dibawah harga pasar.
- 8) Aksesibilitas masyarakat terhadap pangan masih kurang terutama bagi masyarakat kurang mampu, buruh tani dll.
- 9) Ketersediaan pangan yang beragam sampai tingkat rumah tangga masih kurang
- 10) Masih banyak sumber pangan alternatif belum tergali dan dimanfaatkan sebagai penyokong tersedianya pangan.

Potensi yang dimiliki sehingga akan mendukung keberhasilan gerakan ini, antara lain :

- 1) Adanya Kelembagaan pangan (Demapan, Bank Pangan, Lumbung pangan, PUPM, SDP) yang dapat ditumbuh kembangkan untuk mendukung Gerakan Besar Galura.
- 2) Tersedianya Sumberdaya Alam (lahan maupun komoditas) yang mampu menciptakan produk unggulan serta mendukung pengembangan gerakan lumbung pangan
- 3) Lokasi yang strategis, akses pasar pangan, yang mampu menciptakan kawasan cepat tumbuh.
- 4) Adanya Sumberdaya manusia sebagai pelaku usaha atau pelaku gerakan besar pengembangan lumbung rakyat, serta mudahnya memperoleh teknologi serta tersedianya tenaga petugas yang mampu mendampingi atau mengawal bagi perspektif pengembangan Galura.
- 5) Adanya pasar dan permintaan yang membutuhkan kontinuitas ketersediaan pangan.

2. Sistem Logistik Pangan (SILOPANG)

Kebutuhan Pangan menjadi kebutuhan dasar setiap manusia, manusia memerlukan pangan untuk kehidupan. Fungsi dasar pangan untuk kesehatan, kelangsungan kehidupan manusia, dan menyediakan sumber energi untuk mendukung manusia dalam melaksanakan aktivitas. Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa ketahanan pangan akan menentukan ketahanan suatu bangsa. Sehingga menjadi perhatian alam perkembangan budaya dan peradaban manusia dan sumber pangan yang bervariasi.

Pangan diperoleh dari hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan proses pengolahan manufaktur. Penyediaan pangan yang sehat, higienis, halal dan mencukupi sesuai kebutuhan manusia menjadi perhatian pemerintah. Kebutuhan pangan mengikuti jumlah populasi, penduduk, gaya hidup, sosial dan keagamaan, tingkat pendapatan dan selera individu.

Logistik berperan penting dalam penyediaan dan distribusi pangan mulai dari sektor hulu sampai hilir, yang menjangkau ke rumah tangga dan setiap individu. Sistem logistik pangan mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengadaan pangan, transportasi, pergudangan, distribusi, teknologi, aliran informasi dan aliran uang dari penyedia pangan sampai pengguna akhir.

Sistem logistik pangan akan memastikan penyediaan pangan ke rumah tangga dan setiap individu dalam memenuhi kebutuhan pangan secara tepat kuantitas, tepat kualitas, tepat waktu dan biaya logistik distribusi pangan yang efisien. Sistem logistik pangan juga akan menjamin tidak ada kelangkaan pangan dan disparitas harga yang tinggal antar daerah utamanya untuk jenis makanan pokok.

Tujuan dari Sistem Logistik Pangan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan sistem distribusi dan pasokan pangan sehingga memudahkan akses masyarakat memperoleh pangan setiap saat.
- 2) Meningkatkan fungsi Gudang Cadangan Pangan Pemerintah.

- 3) Meningkatkan sistem informasi harga pangan untuk menjaga disparietas harga antar daerah

Sasaran dari sistem Logistik pangan adalah terwujudnya ketahanan pangan masyarakat karena tersedianya pangan yang mencukupi.

Untuk memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan pangan maka harus memperhatikan distribusi dan pasokan pangan setiap saat. Beberapa cara dilaksanakan untuk menjaga distribusi dan pasokan pangan diantaranya dengan meningkatkan fungsi lembaga distribusi pangan yang selama ini dilaksanakan diantaranya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) adalah kegiatan pemberdayaan Gapoktan/Poktan dalam pengembangan agribisnis dan agroindustri gabah/beras dan jagung di wilayah Gapoktan/Poktan oleh Unit Usaha Distribusi dan Pengolahan Hasil dan Unit Pengelola Cadangan Pangan.

Kegiatan dilakukan oleh Unit Usaha Distribusi dan Pengolahan Hasil adalah (i) jual beli gabah/beras dari petani anggota dengan harga yang pantas minimal sama dengan HPP pada saat panen raya agar menjaga agar harga tidak jatuh dan minimal sama dengan HRD untuk jagung, dan (ii) penyimpanan dan pengolahan gabah atau jagung untuk meningkatkan nilai tambah. Kegiatan yang dilakukan oleh Unit Pengelola Cadangan Pangan adalah (i) pembelian gabah/beras untuk cadangan pangan Gapoktan/Poktan untukantisipasi kekurangan pangan pada musim paceklik, sehingga anggota gapoktan dengan cepat dapat mengakses pangan dan (ii) kegiatan pembangunan gudang sebagai sarana penyimpanan gabah/beras.

Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) sampai saat ini berjumlah 16 gapoktan/poktan berada di 16 desa 14 kecamatan, yaitu :

- 1) Masing-masing 1 (satu) buah di Kecamatan Cibalong, Mekarmukti, Leles, Sukaresmi, Garut Kota, Tarogong Kaler, Samarang, Karangtengah, Bungbulang, Banyuresmi, Cisewu dan Talegong.

- 2) Masing-masing 2 (dua) buah di Kecamatan Leuwigoong, Selaawi dan Malangbong

Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) merupakan solusi pemerintah untuk mengatasi gejolak harga dengan (i) menjaga harga pangan yang wajar di tingkat produsen, (ii) memangkas rantai pasokan/pemasaran yang panjang, (iii) mempermudah aksesibilitas pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen, (iv) mengurangi keuntungan middleman, dan (v) merubah struktur pasar menjadi lebih efisien. Selain itu ada LUPM yaitu Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang memenuhi persyaratan tertentu diantaranya memiliki penggilingan padi sendiri, memiliki gudang dan berpengalaman dalam bisnis gabah/beras. Selanjutnya beras yang dihasilkan oleh LUPM ini langsung dipasarkan ke outlet yang disebut dengan Toko Tani Indonesia (TTI) dimana TTI ini berfungsi sebagai pedagang pengecer yang langsung menjual beras ke konsumen.

Komoditas yang diusahakan oleh LUPM ini sejak tahun 2016 selain beras juga bawang merah dan cabe merah. Di Kabupaten Garut sampai tahun ini jumlah gapoktan yang bergerak dalam komoditas beras sebanyak 14 LUPM di 12 kecamatan, yang bergerak dalam komoditas cabe merah sebanyak 3 LUPM di 2 kecamatan dan yang bergerak dalam komoditas bawang merah sebanyak 2 LUPM di 1 (satu) kecamatan.

Kedua lembaga pangan tersebut juga berperan sebagai bandar-bandar kecil yang memasok kepada masyarakat di sekitarnya dan ada juga yang menjadi bandar besar karena mempunyai penggilingan padi sehingga bisa memasok ke distributor/pedagang besar, pedagang kecil/pengecer sehingga akhirnya sampai kepada masyarakat disamping itu juga disalurkan ke sebagian mitra-mitra Bulog dan pedagang besar di luar Kabupaten.

Dari ke 2 Lembaga Pangan tersebut ada stok cadangan pangan masyarakat dimana stok cadangan pangan masyarakat tersebut nantinya bisa menjadi simpul simpul logistik pangan yang ada di masyarakat, sehingga apabila terjadi kerawanan

pangan, bencana alam, bencana kekeringan, dan kenaikan harga yang tinggi stok cadangan pangan tersebut bisa membantu masyarakat sekitar untuk mendapatkannya baik itu anggota lembaga pangan tersebut atau di luar anggotanya.

Dalam rangka memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau dilaksanakan juga Gelar Pangan Murah yang menjual produk pangan dari LDPM dan LUPM, selain itu dilaksanakan juga Gelar Pangan Keliling (Pangling) ke titik-titik lokasi yang rawan pangan.

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten merupakan salah satu dari sistem logistik pangan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan melalui kegiatan bantuan pemberian beras kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dalam rangka stabilitas harga dan penanganan keadaan darurat pangan.

Fungsi gudang cadangan pangan pemerintah menjadi sarana untuk penyimpanan logistik pangan dimana bisa dimanfaatkan sebagai mitra baik dengan LDPM maupun LUPM, sehingga dari hasil pengelolaannya dapat menyisihkan untuk cadangan pangan pemerintah yang manfaatnya untuk membantu masyarakat baik untuk masyarakat miskin maupun masyarakat yang terkena pasca bencana dalam mengatasi kerawanan pangan.

Sistem logistik pangan akan memastikan penyediaan pangan ke rumah tangga dan setiap individu dalam memenuhi kebutuhan pangan secara tepat kuantitas, tepat kualitas, tepat waktu, dan biaya logistik distribusi pangan yang paling efisien. Sistem logistik pangan juga akan menjamin tidak ada kelangkaan pangan dan disparitas harga yang tinggi antardaerah. Utamanya untuk jenis pangan kebutuhan pokok.

Pengelolaan logistik bahan pokok pangan yang efektif akan menjamin ketersediaan bahan pokok pangan dengan biaya logistik yang efisien untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk. Hal ini tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya,

dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Logistik berperan penting untuk turut menjaga ketahanan pangan, mengurangi kelangkaan stock pangan, dan disparitas harga bahan pokok pangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 71 tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah, bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut untuk penyediaan cadangan pangan pokok daerah, dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pokok daerah, disalurkan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerawanan pangan masyarakat pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

Faktor-faktor Pembentuk Harga kebutuhan pokok yaitu keseimbangan, aksi spekulasi/penimbunan, kurs dan harga internasional, logistik dan distribusi. Harga ini akan menentukan terbentuknya aliran dan pergerakan bahan pangan, baik antar wilayah maupun antar waktu.

Dalam perekonomian, harga pangan disatu sisi mempengaruhi pendapatan petani produsen yang pada gilirannya akan menentukan daya beli rumah tangga petani. Disisi lain harga juga mempengaruhi jumlah permintaan konsumen terhadap pangan sesuai dengan kemampuan dan daya beli konsumen.

Dinamika harga pangan yang terjadi sehari-hari merupakan isyarat pasar yang sangat dini untuk menilai tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap pangan.

Gejolak harga pangan (volatilitas) selalu terjadi pada waktu-waktu tertentu, baik oleh karena tingginya permintaan maupun lonjakan penawaran. Gejolak harga di tingkat produsen terjadi pada saat panen raya, sedangkan gejolak harga tingkat

konsumen terjadi pada saat adanya lonjakan permintaan (terutama pada hari-hari besar keagamaan) maupun kelangkaan barang oleh berbagai sebab.

Terjadinya volatilitas harga ditunjukkan oleh fluktuasinya harga. Indikator tinggi rendahnya fluktuasi harga ditunjukkan oleh *Coefisien Variation (CV)*. Nilai CV yang tinggi berpengaruh terhadap inflasi. Pada pasar yang lebih *volatile*, produsen dan konsumen menghadapi tingkat ketidak pastian yang tinggi dan tidak menentu.

Adanya gejolak harga pada sisi produsen terutama para petani kecil sangat terasa dampak buruknya, demikian pula pada sisi konsumen akan berdampak kepada tingkat pengeluaran untuk pangannya.

Sistem logistik pangan yang terintegrasi dari 3 aspek yaitu distribusi dan pasokan pangan, cadangan pangan pemerintah kabupaten, dan informasi harga pangan bisa mewujudkan sistem logistik pangan yang efektif dan efisien yang memudahkan akses masyarakat memperoleh pangan dengan mudah dan harga yang terjangkau sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera tidak kekurangan pangan.

Sistem logistik pangan (SILOPANG) sebagai salah satu gerakan besar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut yaitu dengan memfungsikan Gudang Cadangan Pangan yang berada di Dinas Ketahanan Pangan sebagai sarana penyediaan dan distribusi pangan mulai dari sektor hulu sampai hilir yang menjangkau ke rumah tangga dan setiap individu.

Simpul-simpul logistik yang terdiri dari LDPM, LUPM dan pelaku usaha penggilingan yang berperan sebagai bandar besar maupun bandar kecil yang nantinya sebagai mitra gudang cadangan pangan Dinas Ketahanan Pangan, dimana gudang cadangan pangan ini bisa berfungsi sebagai penyedia pangan terutama jenis pangan kebutuhan pokok sehingga tidak ada kelangkaan pangan dan disparitas harga yang tinggi antardaerah.

Implementasi dari gerakan besar Sistem Logistik Pangan (SILOPANG) salah satunya dengan Gelar Pangan Murah dan Gelar Pangan Keliling (PANGLING) yang bertujuan untuk

memudahkan akses masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau disaat terjadinya disparitas produksi pangan dan indek daya beli masyarakat yang rendah.

3. Peningkatan Kualitas dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (PENTAS PANGAN)

Permasalahan yang dihadapi yang mendasari gerakan ini adalah masih rendahnya penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) yang dapat dilihat dari pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi Kabupaten Garut yang masih rendah.

Gerakan Pentas Pangan bertujuan meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) untuk mencapai skor PPH melalui optimalisasi lahan pekarangan melalui konsep KRPL, pengembangan usaha pengolahan pangan lokal skala usaha mikro (Model Pengembangan Pangan Lokal), meningkatkan kesadaran, peran dan partisipasi masyarakat mewujudkan pola konsumsi pangan B2SA serta mengurangi ketergantungan terhadap pangan pokok beras (Sosialisasi dan Promosi Konsumsi Pangan B2SA).

4. Kendaraan Keliling Pengawasan Pangan (DARLING WASPADALAH)

DARLING WASPADALAH” adalah Kendaraan Keliling Pengawasan Pangan Segar sebagai sarana pengawasan, pengujian, pemantauan dan pembinaan keamanan pangan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan jaminan mutu dan keamanan pangan, serta sebagai sarana promosi, informasi dan edukasi keamanan pangan bagi masyarakat.

Permasalahan yang mendasari dicanangkannya gerakan ini adalah :

- 1) Rendahnya persentase tingkat keamanan pangan (73 %)
- 2) Rendahnya persentase Produk pangan segar yang bersertifikat (18,66 %)
- 3) Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang keamanan pangan dengan indikator :

- Masih terjadinya Kejadian Luar Biasa sebagai akibat keracunan pangan Tahun 2018 (13 kasus)
- Tingginya penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang
- Tingginya penggunaan pestisida pada komoditas sayur dan buah

Untuk mendukung keberhasilan gerakan ini, beberapa potensi yang ada diantaranya :

- 1) Hasil pengawasan dan pengujian keamanan pangan dengan Rapid Test Kit.
- 2) Data KLB Keracunan Pangan Tahun Kabupaten Tahun 2018
- 3) Peralatan dan perlengkapan pengujian pangan dan Rapid Test Kit.
- 4) Mobil laboratorium keliling pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
- 5) Pelaku usaha tani yang telah menerapkan teknik budidaya yang baik (*Good Agriculture Practise/GAP*) sebanyak 228 orang
- 6) Produk pangan segar bersertifikat prima sebanyak 41 produk
- 7) Jumlah Penduduk Garut 2.228.711 orang.

Rencana aksi yang akan dilakukan, sebagai berikut :

- 1) Pengujian keamanan pangan dengan Rapid Test Kit.
- 2) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.
- 3) Surveilans Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
- 4) Rapat pengawasan keamanan pangan
- 5) Sertifikasi Prima Pangan Segar Asal Tumbuhan
- 6) Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (Pangan segar dalam kemasan)
- 7) Bimbingan teknis sertifikasi prima dan registrasi PSAT
- 8) Pembinaan kelembagaan Asosiasi Petani Produk Prima.
- 9) Sosialisasi dan penyeberan informasi keamanan pangan di kawasan sekolah
- 10) Pelatihan penanganan mutu dan keamanan pangan
- 11) Pengadaan bahan informasi (leaflet, brosur, booklet dan banner)
- 12) Temu Pelaku Usaha.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting. Daerah yang mempunyai kemampuan fiskalnya baik, akan memiliki kemampuan yang lebih baik di dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang akhirnya dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Analisis dan proyeksi mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan tahun 2019 dan tahun 2020, asumsi pendapatan tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023.

Pada awal tahun 2020, Indonesia terkena pandemi COVID-19 dengan penyebarannya sangat cepat. Hal ini berdampak pada banyak aspek antara lain aspek sosial dan ekonomi. Sektor usaha masyarakat kecil dan menengah, bahkan industri dalam skala besar juga terkena imbasnya akibat dampak pandemi COVID-19 ini. Perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi dan memutus penyebaran pandemi ini, kebijakan social distancing dan anjuran Work From Home (WFH) yang diambil pemerintah, beberapa sektor perekonomian, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Kebijakan tersebut mengakibatkan berkurangnya aktivitas masyarakat yang berdampak terhadap melemahnya sendi-sendi perekonomian baik dalam skala makro maupun mikro.

Pada tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pemerintahan Daerah, bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

SIPD, dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik. Adapun ruang lingkup SIPD meliputi: a. Informasi Pembangunan Daerah; b. Informasi Keuangan Daerah; dan c. Informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Semua sistem terkait Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk diintegrasikan ke SIPD paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Ini berarti bahwa sistem yang dikembangkan oleh pemerintah pusat sudah terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Sehingga diharapkan dapat mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan belanja kegiatan di Provinsi Jawa Barat.

Pada tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pemerintahan Daerah, bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD, dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik. Adapun ruang lingkup SIPD meliputi: a. Informasi Pembangunan Daerah; b. Informasi Keuangan Daerah; dan c. Informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Semua sistem terkait Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk diintegrasikan ke SIPD paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Ini berarti bahwa sistem yang dikembangkan oleh pemerintah pusat sudah terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Sehingga diharapkan dapat mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan belanja kegiatan di Pemerintah Kabupaten Garut.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2022 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, RENJA Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2022 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran, pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022, benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu penyusunan rencana aksi dalam upaya penggalan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha. Mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan dengan model BOT, leasing, konsensi dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkauan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan *prinsip safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi

pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Tabel 4.1.

**Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2022**

Nama PD : 2.03.01. -Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					22.608.168.718			24.391.384.095				
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.225.151.918			8.387.365.895				
2	09	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					121.001.000			127.050.000				
2	09	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	7 Dokumen	28 Dokumen	30.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	100,00 %	31.762.500
2	09	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	21 Laporan	28 Dokumen	30.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	100,00 %	31.762.500
2	09	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	Hasil evaluasi kinerja	Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 Laporan	28 Dokumen	60.501.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	100,00 %	63.525.000
2	09	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.722.744.386			6.005.415.555				
2	09	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN DKP	Terpenuhinya dokumen administrasi keuangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	1 Tahun	43 Dokumen	5.671.043.386	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00 %	5.954.595.555
2	09	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Terpenuhinya dokumen administrasi keuangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	1 Laporan	43 Dokumen	12.901.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00 %	12.705.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target				
2	09	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun	Terpenuhinya dokumen administrasi keuangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	18 Laporan	43 Dokumen	19.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00 %	19.057.500
2	09	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Laporan dan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Terpenuhinya dokumen administrasi keuangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	12 Laporan	43 Dokumen	19.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00 %	19.057.500
2	09	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							113.595.932				129.609.000		
2	09	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa keamanan kantor	Terpenuhinya penyediaan jasa keamanan kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	1 Tahun	1 Tahun	113.595.932	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	129.609.000
2	09	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							203.319.800				242.665.500		
2	09	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana pendukung disiplin pegawai yang diadakan	Terpenuhinya dokumen administrasi kepegawaian	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	1 Jenis	3 Dokumen	7.156.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	12.705.000
2	09	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah pakaian ASN yang diadakan	Terpenuhinya dokumen administrasi kepegawaian	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	4 Jenis	3 Dokumen	85.219.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	102.910.500
2	09	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah sumberdaya pegawai yang ditingkatkan kualitasnya	Terpenuhinya dokumen administrasi kepegawaian	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	46 Orang	3 Dokumen	110.944.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	127.050.000
2	09	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							517.671.800				540.719.120		
2	09	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan listrik yang dibeli	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	5 Jenis	7 Jenis	3.697.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	3.375.750
2	09	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	3 Jenis	7 Jenis	225.452.900	Dana Transfer Umum-Dana		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	233.666.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		perkantoran									Alokasi Umum				
2	09 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	10 Jenis	7 Jenis	8.308.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	8.743.350
2	09 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah penyediaan makan dan minum	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	1716 Box	7 Jenis	34.605.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	36.336.300
2	09 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	2 Jenis	7 Jenis	47.318.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	49.684.600
2	09 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah majalah dan surat kabar yang berlangganan	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	96 Eksemplar	7 Jenis	10.075.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	11.264.400
2	09 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	1 Tahun	7 Jenis	188.214.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	197.648.220
2	09 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1.123.155.300					862.287.825
2	09 01 2,07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang dibeli	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	1 Unit	8 Jenis	603.780.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	307.362.825
2	09 01 2,07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibeli	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	3 Unit	8 Jenis	112.476.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	38.850.000
2	09 01 2,07 05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah mebelair yang dibeli	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	1 Jenis	8 Jenis	182.309.300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	190.575.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target				
2	09	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah gedung/kantor/bangunan lainnya yang dibangun	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	1 Unit	8 Jenis	143.240.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	157.500.000
2	09	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana gedung/kantor/bangunan lainnya yang diadakan	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	2 Jenis	8 Jenis	81.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	89.250.000
2	09	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung/kantor/bangunan lainnya yang diadakan	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	2 Jenis	8 Jenis	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	78.750.000
2	09	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							168.878.200					177.446.745	
2	09	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Pemenuhan biaya tagihan telepon, air dan listrik	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang yang dibutuhkan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	1 Tahun	5 Jenis	69.818.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	73.341.345
2	09	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang yang dibutuhkan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	10 Unit	5 Jenis	16.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	16.863.000
2	09	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang yang dibutuhkan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	1 Tahun	5 Jenis	83.000.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	87.242.400
2	09	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							254.785.500				302.172.150		
2	09	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang terpelihara dan terbayarkan pajak	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	23 Unit	29 Unit	100.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	111.597.150
2	09	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara dan terbayarkan pajak	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	4 Unit	29 Unit	13.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	16.275.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target				
2	09	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Gedung kantor yang terpelihara	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	1 Unit	29 Unit	90.995.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	95.550.000
2	09	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100,00 %	1 Unit	29 Unit	50.090.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100,00 %	78.750.000
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN								1.711.755.900				1.901.245.000	
2	09	02	2,01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								1.711.755.900					1.901.245.000
2	09	02	2,01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Persentase peningkatan stok pangan utama di lumbung pangan masyarakat	Jumlah lumbung pangan yang difasilitasi	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	Kab. Garut, Karangpawitan, Sitasari Kab. Garut, Kadungora, Cikembulan Kab. Garut, Leuwigoong, Karanganyar Kab. Garut, Sukawening, Maripari Kab. Garut, Bayongbong, Banjarsari Kab. Garut, Cisurupan, Simajaya Kab. Garut, Sukaresmi, Sukajaya Kab. Garut, Banjarwangi, Talagajaya Kab. Garut, Singajaya, Sukawangi Kab. Garut, Cikelet, Girimukti Kab. Garut, Bl. Limbangan, Surabaya Kab. Garut, Bl. Limbangan, Dunguswiru Kab. Garut, Selaawi, Selaawi	48,00 %	13 Unit	9 Unit	1.145.115.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan stok pangan utama di lumbung pangan masyarakat	48,00 %	1.312.850.000
2	09	02	2,01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Persentase peningkatan stok pangan utama di lumbung pangan masyarakat	Jumlah penyediaan lantai jemur	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	Kab. Garut, Pameungpeuk, Pameungpeuk Kab. Garut, Cisompot, Panyindangan	48,00 %	2 Unit	9 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan stok pangan utama di lumbung pangan masyarakat	48,00 %	100.000.000
2	09	02	2,01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Persentase peningkatan stok pangan utama di lumbung pangan masyarakat	Belanja mesin pengolahan pangan Belanja sarana produksi pemanfaatan pekarangan Belanja usaha budidaya ikan Belanja usaha budidaya tanaman pangan	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	Kab. Garut, Mekarmukti, Karangwangi Kab. Garut, Bl. Limbangan, Dunguswiru	48,00 %	2 Jenis 10 Jenis 30000 Ekor 3 Jenis 1 Jenis	9 Unit	216.640.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan stok pangan utama di lumbung pangan masyarakat	48,00 %	238.395.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
			Belanja usaha budidaya ternak														
2	09	02	2,01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Persentase peningkatan stok pangan utama di lumbung pangan masyarakat	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilaksanakan	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,00 %	1 Kali	9 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan stok pangan utama di lumbung pangan masyarakat	48,00 %	100.000.000
2	09	02	2,01	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Persentase peningkatan stok pangan utama di lumbung pangan masyarakat	Jumlah laporan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Kemandirian Pangan	Terpenuhinya penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan		48,00 %	1 Laporan	9 Unit	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan stok pangan utama di lumbung pangan masyarakat	48,00 %	150.000.000
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							10.992.114.250			12.101.642.700		
2	09	03	2,01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							970.716.000			1.005.353.700		
2	09	03	2,01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Persentase ketersediaan informasi harga pangan	Analisis Neraca Bahan Makanan yang disusun	Informasi harga pangan yang disusun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	75,40 %	1 Buku 1 Buku	33 %	159.410.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan informasi harga pangan	75,40 %	150.000.000
2	09	03	2,01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase ketersediaan informasi harga pangan	Pengembangan sentra pangan lokal	Efisiensi distribusi pangan	Kab. Garut, Sukawening, Pasanggrahan Kab. Garut, Singajaya, Cigitung Kab. Garut, Selaawi, Samida	75,40 %	4 Lokasi	33 %	237.554.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan informasi harga pangan	75,40 %	261.311.600
2	09	03	2,01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Persentase ketersediaan informasi harga pangan	Jumlah komoditi pangan yang dipantau Jumlah lokasi pemantauan harga pangan	Efisiensi distribusi pangan	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Kelurahan Kab. Garut, Samarang, Semua Kelurahan Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan Kab. Garut, Malangbong, Semua Kelurahan Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan Kab. Garut, Cilawu, Semua Kelurahan Kab. Garut, Cisarupan, Semua Kelurahan Kab. Garut, Cikajang, Semua Kelurahan Kab. Garut, Pameungpeuk, Semua Kelurahan	75,40 %	9 Komoditi 10 Lokasi	33 %	65.632.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan informasi harga pangan	75,40 %	65.110.100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	09	03	2,01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Persentase ketersediaan informasi harga pangan	Jumlah kelembagaan distribusi pangan yang dibina Jumlah lokasi pemantauan distribusi pangan	Efisiensi distribusi pangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,40 %	20 Kelompok 10 Lokasi	33 %	208.120.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan informasi harga pangan	75,40 %	228.932.000
2	09	03	2,01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Persentase ketersediaan informasi harga pangan	Jumlah Gelar Pangan yang dilaksanakan Jumlah kelembagaan usaha pangan yang dibina	Efisiensi distribusi pangan	Kab. Garut, Samarang, Semua Kelurahan Kab. Garut, Bayongbong, Semua Kelurahan Kab. Garut, Cilawu, Semua Kelurahan Kab. Garut, Cisurupan, Semua Kelurahan Kab. Garut, Cikajang, Semua Kelurahan	75,40 %	5 Kali 4 Kelompok	33 %	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan informasi harga pangan	75,40 %	300.000.000
2	09	03	2,02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						7.540.325.000						8.294.357.000	
2	09	03	2,02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase penguatan penyediaan cadangan pangan pemerintah	Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah	Terpenuhinya penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD)	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,00 %	500 Ton	500 Ton	7.540.325.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penguatan penyediaan cadangan pangan pemerintah	26,00 %	8.294.357.000
2	09	03	2,04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						2.481.073.250							2.801.932.000
2	09	03	2,04	02	Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat konsumsi	Fasilitas peningkatan	Ratio konsumsi protein	Kab. Garut, Garut Kota,	65,50 %	8	12,6 %	2.481.073.250	Dana		Tingkat konsumsi Sayur	65,50 %	2.801.932.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
	dalam Pengendalian Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Sayur dan Buah	pengolahan pangan lokal Pengembangan pangan lestari Promosi yang dilakukan	nabati terhadap total konsumsi ideal	Kota Wetan Kab. Garut, Garut Kota, Sukanegla Kab. Garut, Tarogong Kaler, Sukawangi Kab. Garut, Leles, Margaluyu Kab. Garut, Leuwigoong, Sindang Sari Kab. Garut, Cibatu, Cibunar Kab. Garut, Malangbong, Campaka Kab. Garut, Bayongbong, Mulyasari Kab. Garut, Cilawu, Karyamekar Kab. Garut, Cisarupan, Pamulihan Kab. Garut, Banjarwangi, Talagajaya Kab. Garut, Pameungpeuk, Bojong Kidul Kab. Garut, Cisompet, Jatisari Kab. Garut, Cikelet, Cikelet Kab. Garut, Bungbulang, Sinarjaya Kab. Garut, Mekarmukti, Mekarsari Kab. Garut, Bl. Limbangan, Surabaya Kab. Garut, Pangatikan, Sukahurip		Kelompok 10 Kelompok 6 Kali				Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		dan Buah				
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						803.397.900				848.737.800		
2	09	04	2,01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						250.000.000				250.000.000		
2	09	04	2,01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Persentase penurunan daerah rawan pangan	Jumlah Laporan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Laporan Analisa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	8,14 %	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penurunan daerah rawan pangan	8,14 %	250.000.000
2	09	04	2,02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						553.397.900				598.737.800		
2	09	04	2,02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase penurunan daerah rawan pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan yang dilaksanakan	Berkurangnya desa/lokasi/daerah rawan/rentan pangan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,14 %	4 Kali	5 Lokasi	99.999.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penurunan daerah rawan pangan	8,14 %	100.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	09	04	2,02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan daerah rawan pangan	Jumlah daerah rentan pangan yang diintervensi	Berkurangnya desa/lokasi/daerah rawan/rentan pangan	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Pasawahan Kab. Garut, Malangbong, Sukajaya Kab. Garut, Sukaresmi, Sukajaya Kab. Garut, Banjarwangi, Kadongdong Kab. Garut, Singajaya, Sukawangi Kab. Garut, Cisewu, Panggalih	8,14 %	6 Lokasi	5 Lokasi	453.398.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penurunan daerah rawan pangan	8,14 %	498.737.800
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						875.748.750				1.152.392.700			
2	09	05	2,01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						875.748.750				1.152.392.700			
2	09	05	2,01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	Pelaku usaha pangan segar yang dibina	Meningkatnya produk pangan segar asal tumbuhan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan	Kab. Garut, Wanaraja, Cinunuk Kab. Garut, Wanaraja, Sindangprabu Kab. Garut, Samarang, Citarakyat Kab. Garut, Kadungora, Cisaat Kab. Garut, Kadungora, Tanggulun Kab. Garut, Malangbong, Citeras Kab. Garut, Malangbong, Baru Dua Kab. Garut, Bayongbong, Panembong Kab. Garut, Bayongbong, Ciburuy Kab. Garut, Cigedug, Cigedug Kab. Garut, Cisirupan, Cisirupan Kab. Garut, Cikajang, Girijaya Kab. Garut, Cikajang, Cikandang Kab. Garut, Mekarmukti, Mekarsari Kab. Garut, Caringin, Caringin	77,00 %	150 Orang	15 Produk	101.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pangan yang aman dikonsumsi	77,00 %	111.986.700
2	09	05	2,01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	Jumlah Sertifikat Prima Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan	Meningkatnya produk pangan segar asal tumbuhan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,00 %	5 Produk	15 Produk	146.083.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pangan yang aman dikonsumsi	77,00 %	200.172.000
2	09	05	2,01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	Jumlah registrasi produk Pangan Segar Asal Tumbuhan	Meningkatnya produk pangan segar asal tumbuhan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,00 %	10 Produk	15 Produk	125.982.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pangan yang aman dikonsumsi	77,00 %	200.172.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	09	05	2,01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Meningkatnya produk pangan segar asal tumbuhan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,00 %	10 Produk	15 Produk	104.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pangan yang aman dikonsumsi	77,00 %	200.172.000
2	09	05	2,01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	Jumlah pengujian pangan	Meningkatnya produk pangan segar asal tumbuhan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,00 %	750 Sampel	15 Produk	397.783.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pangan yang aman dikonsumsi	77,00 %	439.890.000
TOTAL												22.608.168.718			24.391.384.095			

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Sasaran Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut tahun 2019-2024. Program dan kegiatan yang tertuang dimaksud harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang melekat pada Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam program dan kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan forum Perangkat Daerah dibawah lingkup Bappeda agar program / kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

5.2 Kaidah- kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut sebagai berikut :

- a. Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2022 masih belum sempurna terkait belum lengkapnya data-data yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi seluruh tabel yang diperlukan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
- b. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJPM Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Garut dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Garut.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Diperlukan peningkatan kapasitas aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan dan pelatihan formal, bimbingan teknis serta seminar-seminar tentang perencanaan pembangunan;
- b. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam Musrenbang;
- c. Mengintensifkan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas perencanaan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna;
- d. Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- e. Menjadikan hasil evaluasi pembangunan sebagai dasar perencanaan yang lebih baik dan tepat sasaran untuk tahun-tahun berikutnya.

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN